

SKRIPSI

KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT WISATA DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Muh Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113620

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Dekan

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dr. Andi Luhur Prianto, S.I.P., M.Si

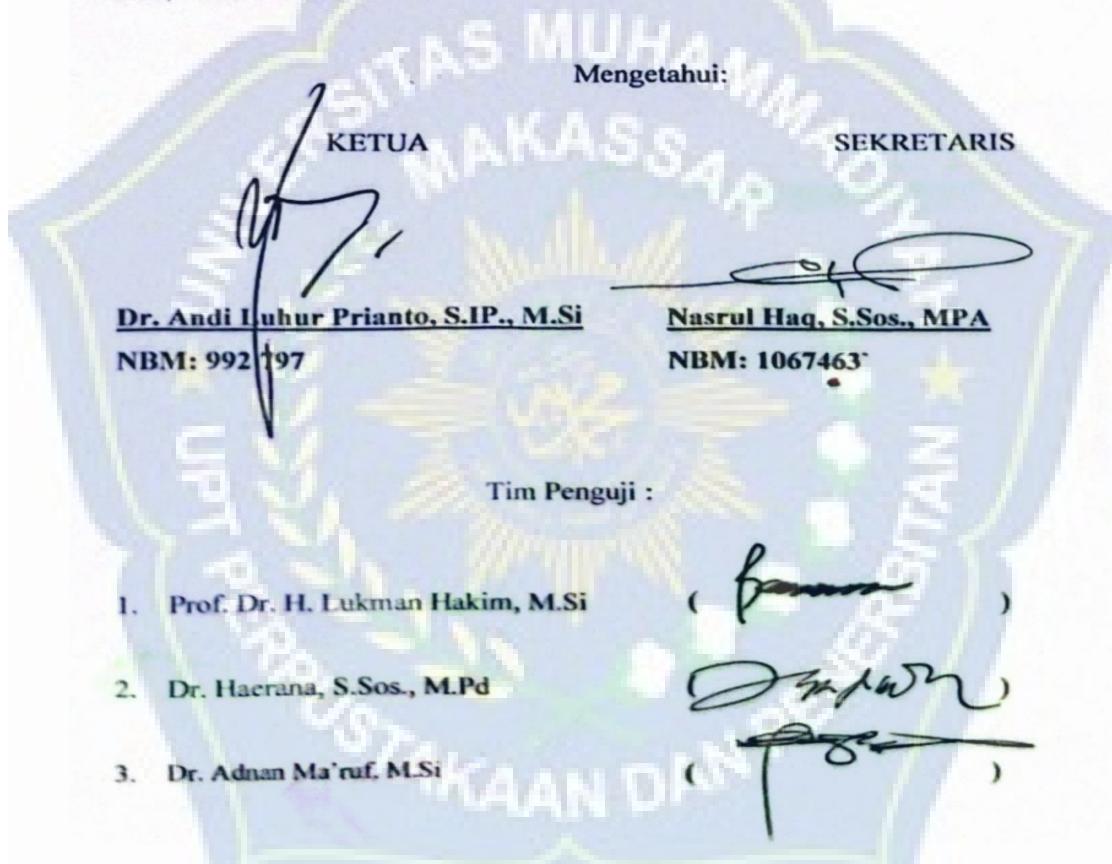
NBM: 992797

Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si

NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh **TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar**, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0452/FSP/A.4-II/VII/47/2025 sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Rabu, 16 Juli 2025.



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113620

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Juli 2025

Yang Menyatakan,

Muh Akbar

ABSTRAK

Muh Akbar, Burhanuddin Dan Nurbiah Tahir, Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kawasan ini dikenal memiliki potensi wisata alam yang tinggi, namun di tengah perkembangan pariwisata yang pesat, muncul berbagai tantangan terkait pengelolaan lahan, seperti alih fungsi lahan pertanian, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, hingga potensi kerusakan lingkungan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada lima indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yaitu: efektivitas, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti dinas terkait (Dinas Pariwisata, Dinas PUPR), pemerintah kecamatan, dan masyarakat lokal, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kebijakan penggunaan lahan untuk pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong telah cukup efektif dalam memanfaatkan karakteristik geografis wilayah yang mendukung pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih belum optimal karena tidak seluruh lokasi wisata terdaftar secara resmi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARD). Dari segi kecukupan, alokasi lahan wisata hanya mencakup sekitar 5–10% dari total wilayah dan fasilitas penunjang seperti toilet, tempat sampah, serta akses jalan masih terbatas, terutama di destinasi baru. Dalam hal kesetaraan, meskipun masyarakat memiliki akses sebagai pengunjung dan tenaga kerja, belum semua terlibat sebagai pelaku usaha karena keterbatasan pemahaman terhadap peruntukan lahan dan dukungan modal. Responsivitas pemerintah juga dinilai belum maksimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga serta lambatnya pembaruan dokumen perencanaan. Adapun ketepatan kebijakan masih perlu diperbaiki terutama dalam hal perlindungan lingkungan, pengendalian konflik lahan, serta kejelasan zonasi ruang melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama wisata, percepatan penyusunan RDTR, serta peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan agar pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong dapat berlangsung secara adil, terencana, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, penggunaan lahan, pariwisata, Kecamatan Tinggimoncong, William N. Dunn.

ABSTRACT

Muh Akbar, Burhanuddin and Nurbiah Tahir, Land Use Policy as a Tourist Attraction in Tinggimoncong District, Gowa Regency

Land use policy as a tourist attraction in Tinggimoncong District, Gowa Regency. This area is known to have high natural tourism potential, but amidst the rapid development of tourism, various challenges have emerged related to land management, such as conversion of agricultural land, inequality in the distribution of economic benefits, and potential environmental damage. The evaluation was carried out by referring to five policy evaluation indicators from William N. Dunn, namely: effectiveness, adequacy, equality, responsiveness, and accuracy.

The method used is a qualitative approach with a case study research type. Data were collected through in-depth interviews with key informants such as related agencies (Tourism Agency, PUPR Agency), sub-district governments, and local communities, as well as through field observations and documentation studies. Data analysis was carried out through the process of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that in general the land use policy for tourism in Tinggimoncong District has been quite effective in utilizing the geographical characteristics of the region that support the development of nature-based and agricultural tourism. However, the effectiveness of the policy is still not optimal because not all tourist locations are officially registered in the Regional Spatial Plan (RTRW) and the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPARD). In terms of adequacy, the allocation of tourist land only covers around 5-10% of the total area and supporting facilities such as toilets, trash bins, and road access are still limited, especially in new destinations. In terms of equality, although the community has access as visitors and workers, not all are involved as business actors due to limited understanding of land use and capital support. The government's responsiveness is also considered less than optimal due to weak coordination between institutions and slow updating of planning documents. The accuracy of the policy still needs to be improved, especially in terms of environmental protection, land conflict control, and clarity of spatial zoning through the preparation of the Detailed Spatial Plan (RDTR).

Based on these findings, this study recommends the importance of strengthening cross-sector coordination, training and empowerment of local communities as the main actors in tourism, accelerating the preparation of RDTR, and increasing supervision of land conversion so that tourism development in Tinggimoncong District can take place in a fair, planned, and sustainable manner.

Keywords: *Policy evaluation, land use, tourism, Tinggimoncong District, William N. Dunn.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa"**. Skripsi ini diajukan dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk mencapai gelar Serjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab V Penutup. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, motivasi dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si sebagai Pembimbing I saya dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.Si sebagai Pembimbing II saya yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, arahan dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk syarat kelulusan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M. Ap selaku Sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staff di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa , Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Serta Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dengan memberikan izin penelitian penyusunan skripsi ini. Serta seluruh pihak yang berperan dalam penyelesaian penulisan skripsi dari penulis.

Penulis juga secara istimewa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yunus Dg. Kalling dan Ibunda Dg. Ngintang yang telah merawat, mendidik, memotivasi dan mendoakan tiada henti- hentinya mengiringi setiap langkah penulis dengan kasih saying, cinta dan harapan beliau sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan di strata satu di Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Kepada saudari-saudari saya dalam hal ini Syamsiah Dg. Te'ne, Rukiyati, S.Pd.SD.,Gr dan Kartini Dg. Puji yang telah memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis, agar menyelesaikan Pendidikan Strata Satu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Kepada dan sahabat-sahabat penulis yang telah memberi doa, dukungan, bantuan dan tidak pernah bosan mendengar keluh kesah penulis dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dan telah membantu selama masa perkuliahan.
4. Kepada tempat bernaung selain kampus yakni organisasi tercinta Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa Koordinatorat Tinggimoncong yang menjadi tempat mengolah rasa, mengasah skill dan jiwa sosial sewaktu penulis menapaki Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada teman- teman di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA)
6. Kepada diri sendiri yang telah bertahan dan mempu menyelesaikan penulisan skripsi ini menapaki jenjang Pendidikan strata satu yang memiliki lika liku dunia Pendidikan yang luar biasa ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk semua mahasiswa Ilmu Administrasi Negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Dan Teori	9
C. Kerangka Pikir	19
D. Fokus Penelitian	20
E. Deskripsi Fokus Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Pengabsahan Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Hasil Penelitian.....	37

C. Pembahsan.....	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kerangka Pikir.....	20
Tabel 2. 2 Informan Penelitian	27
 Tabel 4. 1 Data Tempat Wisata Di Kecamatan Timoncong Dari Rencana Induk Pemabangunan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2035.....	41
Tabel 4. 2 Data Tempat Wisata Yang belum Terdaftar Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gowa	41
Tabel 4. 3Rekomendasi Tempat Wisata Baru Yang Di Keluarkan Dinas Pariwisata Tahun 2022-2024.....	46
Tabel 4. 4 Data Tutupan lahan Kecamatan Tinggimoncong tahun 2024.....	48
Tabel 4. 5 Data Sarana dan Prasarana Akomodasi Transportasi dan Komunikasi Kecamatan Tinggimoncong	51
Tabel 4. 6 Data Indikator kualitas hidup Masyarakat Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2023	56
Tabel 4. 7 Data Penujang Kualitas Hidup Masyarakat Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2024	58
Tabel 4. 8 Data Konflik penggunaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2021-2025	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 2 Peta Wilayah Kecamatan Tinggimoncong 28



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan lahan untuk pariwisata merupakan aspek penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial suatu daerah. Yogyakarta, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan evaluasi yang cermat terhadap kebijakan penggunaan lahan yang ada.

Evaluasi kebijakan penggunaan lahan bertujuan untuk menentukan kesesuaian lahan bagi pengembangan pariwisata. Hal ini mencakup analisis terhadap karakteristik fisik lahan, seperti kemiringan lereng, jenis tanah, serta kondisi drainase dan erosi. Misalnya, penelitian di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa evaluasi kemampuan lahan dilakukan dengan menggunakan data citra satelit untuk memahami potensi daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata.(Yoga & Khomsin, 2013)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggunaan lahan untuk tujuan pariwisata diatur sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 4 menetapkan tujuan pembangunan kepariwisataan, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032, Pasal 8 ayat (6) menyebutkan strategi pengembangan potensi pariwisata, termasuk mengembangkan Taman Wisata Alam Malino sebagai kota bunga yang ramah lingkungan dan mendukung fungsinya sebagai Kawasan Lindung Nasional di Kabupaten Gowa.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 03 tahun 2022 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2021-2035

Peraturan-peraturan tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai penggunaan lahan untuk pariwisata, memastikan bahwa pengembangan sektor ini dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan memperhatikan aspek lingkungan serta budaya lokal.

Dalam pengelolaan kebijakan pariwisata, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang harus diperhatikan. Faktor pendukung termasuk keberadaan infrastruktur yang memadai dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata. Sebaliknya, faktor penghambat bisa berupa kondisi geografis yang tidak mendukung atau kurangnya fasilitas yang memenuhi standar keamanan. Penelitian di Danau Di atas, misalnya, menunjukkan bahwa meskipun ada potensi wisata, perencanaan atraksi yang belum optimal menjadi kendala utama (Yenti et al., 2023).

Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dengan luas wilayah sekitar 256,50 km², mengalami perubahan signifikan dalam penggunaan lahan dari tahun ke tahun, sebagaimana dianalisis oleh Munawir, Barus, dan

Sudadi (2019) menggunakan pendekatan spasial. Pada awal penelitian, lahan pertanian mendominasi sekitar 55% dari total luas wilayah, tetapi menurun menjadi 40% akibat konversi lahan menjadi pemukiman dan kawasan wisata. Hal serupa terjadi pada kawasan hutan, yang awalnya mencakup 35% dari wilayah Tinggimoncong, namun menyusut menjadi 25% karena pembukaan lahan untuk pembangunan. Sebaliknya, lahan yang digunakan untuk pemukiman dan infrastruktur meningkat dari 5% menjadi 15%, seiring dengan pertumbuhan kebutuhan hunian dan fasilitas transportasi. Kawasan wisata juga mengalami pertumbuhan signifikan, dari hanya 5% menjadi 20% dari total luas wilayah, terutama untuk mendukung pengembangan objek wisata seperti Malino Highlands dan fasilitas pendukungnya. Perubahan ini menunjukkan adanya tekanan pembangunan terhadap lahan konservasi, yang berdampak pada penurunan fungsi ekologis, seperti berkurangnya area resapan air, meningkatnya risiko erosi, dan kerusakan habitat. Penurunan total 25% pada lahan pertanian dan hutan menunjukkan pentingnya pengelolaan tata ruang yang lebih baik. Penelitian ini menekankan perlunya strategi pembangunan yang berkelanjutan untuk mengimbangi kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan di Kecamatan Tinggimoncong.

Beberapa uraian di atas penting kiranya melakukan evaluasi kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata untuk menilai dan mengukur sejauh mana kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata telah mencapai tujuan yang diinginkan dan apakah pelaksanaannya sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N Dunn (2013) yakni efektivitas, kecukupan, Kesetaraan , responsif dan ketepatan (Damanik & Marom, 2016). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong agar senantiasa menjaga ekosistem dan keberlanjutannya.

Maka penting kiranya melakukan penelitian terkait dengan **“Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana kecukupan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana Kesetaraan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?
4. Bagaimana Responsivitas pemerintah terkait dengan kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?
5. Bagaimana ketepatan kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas maka, ,tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui kecukupan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa telah merata.
4. Untuk mengetahui sejauh mana responsivitas pemerintah terkait isu penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
5. Untuk mengetahui ketepatan dari penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai kontribusi atas partisipasi dalam kajian ilmu administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan penggunaan lahan untuk tempat wisata.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting khususnya bagi pemerintah dan Masyarakat tentang kebijakan penggunaan lahan untuk tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan. Adapun hasil penelusuran beberapa literatur kepustakaan yang dimaksud, antara lain:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Yogyakarta	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Annas & Rusnaedy, 2019)	Evaluasi Kebijakan Tata Ruang dan Bangunan Reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar	Dalam studinya, mereka menganalisis kebijakan tata ruang dan bangunan pada proyek reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reklamasi memberikan manfaat ekonomi, terdapat berbagai pelanggaran terhadap peraturan tata ruang yang berlaku, seperti perubahan fungsi lahan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan kebijakan tata ruang dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.	(Munawir et al., 2019)	Analisis Spasial Dinamika Konversi Lahan Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	Penelitian ini mengkaji dinamika konversi lahan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, melalui pendekatan analisis spasial. Penelitian mereka menemukan bahwa konversi lahan di wilayah tersebut didorong oleh kebutuhan akan pembangunan perumahan dan infrastruktur, yang seringkali mengorbankan lahan pertanian produktif. Studi ini menekankan perlunya perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan lingkungan..
3.	(Nafiah et al., 2022)	Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030	Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan RTRW, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya kesesuaian antara kebijakan yang dirancang dengan kebutuhan lokal. Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan koordinasi antar-stakeholder dalam implementasi kebijakan tata ruang.

B. Konsep Dan Teori

1. Kebijakan Pengunaan Lahan Wisata

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032'

RTRW Kabupaten Gowa menjelaskan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks wisata, penggunaan lahan diarahkan agar mampu menunjang pengembangan kawasan wisata yang: Produktif dan berkelanjutan, Aman dan nyaman untuk dikunjungi dan Mendukung pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Penggunaan lahan wisata termasuk dalam kategori kawasan budidaya yang disesuaikan dengan potensi alam, sosial, dan budaya setempat.

Pasal 6 RTRW menyebutkan bahwa penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata. Dengan demikian, pariwisata termasuk prioritas pengembangan dalam pemanfaatan ruang wilayah Gowa.

Fungsi ruang ini bertindak sebagai pedoman dalam: Pemanfaatan ruang untuk pengembangan pariwisata, Penetapan lokasi kawasan wisata yang tepat secara ekologis dan ekonomis, Mengintegrasikan kawasan wisata dengan sektor transportasi, industri kreatif, dan pelayanan umum.

Pasal 7 huruf f secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu kebijakan penataan ruang adalah pengembangan potensi pariwisata. Ini termasuk: Pemilihan lokasi kawasan wisata berdasarkan daya tarik alami dan aksesibilitas, Perlindungan situs budaya dan kawasan lindung yang menjadi objek wisata dan Penyediaan infrastruktur pendukung (akomodasi, jalan, transportasi).

Pasal 8 ayat (6) memuat strategi spesifik, antara lain: Pengembangan Taman Wisata Alam Malino sebagai kota bunga ramah lingkungan, sekaligus mendukung fungsi Kawasan Lindung Nasional, Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata seperti MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), Pelestarian situs budaya dan peningkatan aksesibilitas antar objek wisata, Promosi dan penguatan jaringan industri pariwisata secara global.

- b. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gowa Tahun 2021-2035

Berdasarkan *Perda No. 03 Tahun 2022*, kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kabupaten Gowa disusun dalam kerangka pembangunan kepariwisataan yang terpadu, berbasis masyarakat, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan terhadap nilai budaya dan lingkungan (Pasal 2 ayat (1)–(2)). Landasan utama dalam kebijakan ini tertuang dalam dokumen RIPPDA yang mencakup prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan hingga tahun 2035.

Secara konseptual, penggunaan lahan wisata diatur melalui pendekatan kawasan yang melibatkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) (Pasal 11). KSPK ditetapkan untuk wilayah dengan potensi utama pariwisata dan dampak besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, seperti Kawasan Ekowisata Malino (meliputi Kecamatan Tinggimoncong, Parangloe, Parigi, dan Tombolo Pao) yang bertema agrowisata dan petualangan (Pasal 14 ayat (1)). Sementara itu, KPPK dikembangkan dengan tema tertentu, seperti kawasan rekreasi keluarga di Kecamatan Pattallassang dan Bontomarannu (Pasal 14 ayat (2)).

Rencana penggunaan lahan secara lebih spesifik diuraikan dalam Pasal 10, yang mengatur pembangunan destinasi wisata meliputi: Penataan wilayah destinasi (DPK, KSPK, dan KPPK), Pengembangan daya tarik wisata (DTW), Pembangunan aksesibilitas (Pasal 19), Pembangunan dan prasarana dan fasilitas umum (Pasal 21), pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 22).

Penggunaan lahan dalam kawasan wisata diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan tanpa merusak daya dukung lingkungan, melalui pendekatan seperti pembangunan kebun botani, sarana olahraga, pusat kuliner, mitigasi bencana, dan pengelolaan limbah (Pasal 16 ayat (2)). Secara kelembagaan, kebijakan ini

didukung oleh penguatan organisasi kepariwisataan dan peran serta masyarakat, termasuk pembentukan Kelompok Sadar Wisata, peningkatan kompetensi SDM, dan fasilitasi usaha mikro pariwisata (Pasal 28–30). Pasal 24 juga menyebutkan bahwa usaha pariwisata termasuk kawasan wisata, desa wisata, dan ekowisata, yang secara langsung mengatur bentuk pemanfaatan lahan untuk kegiatan wisata. Selain itu, arah pembangunan kawasan juga ditentukan berdasarkan potensi dan tema dominan, yang dituangkan dalam Lampiran I dan IV Perda ini. Penataan ruang untuk wisata dilaksanakan dengan penyesuaian regulasi dan zonasi, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti informasi wisata, akomodasi, transportasi, dan fasilitas pelayanan publik (Pasal 13).

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak (Mais et al., 2019). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan, seperti memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program (Wirandi & Sahar, 2020).

Dalam konteks evaluasi kebijakan, teori evaluasi kebijakan sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan berguna untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah efektif dalam meningkatkan kualitas objek wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Kesesuaian lahan, daya dukung lahan, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata, dan teori fungsi-fungsi manajemen sangat relevan dalam konteks penggunaan lahan sebagai tempat wisata (Sihombing & Sihombing, 2023).

Menurut Situmorang (2016), evaluasi kebijakan dilakukan untuk menemukan penyebab kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Dalam konteks penggunaan lahan sebagai tempat wisata, evaluasi kebijakan berguna untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah efektif dalam meningkatkan kualitas objek wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Teori evaluasi kebijakan adalah suatu konsep yang menjelaskan bagaimana kebijakan dapat dievaluasi untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam indikator, seperti berat badan bayi berdasarkan umur sebagai indikator terhadap status gizi bayi. Dalam teori sistem, pembuatan kebijakan publik melibatkan tiga elemen yaitu pelaku

kebijakan, kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan (Permatasari, 2020).

Menurut Damanik & Marom, (2016) dalam konteks evaluasi kebijakan, teori evaluasi kebijakan sangat relevan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah efektif dalam meningkatkan kualitas objek wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Kesesuaian lahan, daya dukung lahan, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata, dan teori fungsi-fungsi manajemen sangat relevan dalam konteks penggunaan lahan sebagai tempat wisata. Kebijakan berhasil atau gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. William N Dunn, (2003) mengembangkan lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup sebagai berikut:

a. Efektivitas

Efektivitas mengandung pengertian taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun usaha dari segi usaha yang diukur. Berdasarkan hasil temuan di lapangan pelaksanaan program pelatihan keterampilan dapat dikatakan berhasil karena diterima cukup baik oleh masyarakatnya.

b. Kecukupan

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan dalam menjawab persoalan yang dala Masyarakat miskin. Kecukupan dalam evaluasi kebijakan adalah suatu indikator yang menunjukkan seberapa jauh

kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kecukupan ini berfokus pada penilaian apakah kebijakan tersebut telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat yang diharapkan.

c. Kesetaraan

Kesetaraan adalah suatu aspek yang menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara merata dan adil. Kesetaraan ini berfokus pada penilaian apakah kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang sama kepada semua pihak yang terkena kebijakan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Kesetaraan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik.

d. Responsivitas

Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Kriteria responsivitas melihat kesesuaian antara program pelatihan keterampilan dengan keinginan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat.

e. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak positif dari pelaksanaan program ini sudah dapat dirasakan.

3. Kesesuaian Lahan

Lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang mencakup berbagai komponen fisik dan biologis yang saling berinteraksi serta mempengaruhi potensi dan cara penggunaannya. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), lahan didefinisikan sebagai "sebidang area yang dapat dibedakan di permukaan bumi yang mencakup semua atribut biosfer yang berada tepat di atas atau di bawah permukaan tersebut, termasuk iklim, bentuk lahan, hidrologi, lapisan sedimen, vegetasi, hewan, serta hasil aktivitas manusia seperti bangunan, jalan, dan sistem irigasi" (FAO, 1995).

Sementara itu, Arsyad (2010) menjelaskan bahwa lahan adalah "lingkungan fisik di permukaan bumi yang mencakup iklim, relief/topografi, tanah, air, vegetasi, dan hasil kegiatan manusia, yang secara bersama-sama mempengaruhi penggunaan lahan tersebut untuk berbagai keperluan".

Kesesuaian lahan sebagai tempat wisata sangat penting untuk menjamin keberlangsungan objek wisata dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Dalam konteks penggunaan lahan sebagai tempat wisata, evaluasi kebijakan berguna untuk mengetahui sejauh

mana kebijakan tersebut telah efektif dalam meningkatkan kualitas objek wisata.

Menurut Purwanto, (2013) kesesuaian lahan berfokus pada penilaian karakteristik fisik lahan untuk menentukan apakah suatu area cocok untuk digunakan sebagai lokasi wisata. Kriteria yang sering digunakan dalam evaluasi kesesuaian lahan meliputi:

- a. Topografi: Kemiringan lereng dan bentuk permukaan yang mempengaruhi aksesibilitas dan keamanan.
- b. Jenis Tanah: Mempertimbangkan kesuburan tanah, drainase, dan potensi erosi.
- c. Sumber Daya Alam: Ketersediaan air, vegetasi, dan keindahan alam yang dapat menarik wisatawan.

4. Dampak penggunaan lahan untuk tempat wisata

Alih fungsi lahan untuk pariwisata di Yogyakarta telah membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Secara positif, pengembangan lahan wisata meningkatkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif (Rahmawati & Kurniawan, 2019). Namun, sisi negatifnya mencakup degradasi lingkungan, konflik sosial, dan penurunan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam.

Misalnya, di Bali, studi Taufik dan Nurhadi (2018) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata di Canggu menyebabkan peningkatan polusi, kemacetan, dan konflik antara

pemilik lahan asli dan pengembang. Di Yogyakarta, Yanuari dan Lestari (2020) menemukan bahwa pesatnya pembangunan pariwisata memicu hilangnya lahan hijau dan menurunkan kualitas air tanah. Dampak negatif ini sering kali menjadi kendala dalam menciptakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, terutama di kawasan yang memiliki ekosistem rentan.

5. Kebijakan Konversi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata.

Dalam konteks penggunaan lahan sebagai tempat wisata, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Eka, 2020; Fauziah et al., 2018).ditemukan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi destinasi wisata di sekitar Cafe Sawah disebabkan beberapa faktor, yaitu; Meningkatkan kualitas objek wisata. Meningkatkan kunjungan wisatawan., meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian ke penggunaan lain bukanlah fenomena baru; seiring dengan berkembangnya populasi dan ekonomi dunia, kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Dalam konteks penggunaan lahan sebagai tempat wisata, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Santoso, ditemukan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi objek wisata memberikan

dampak positif bagi masyarakat setempat. Namun, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti turunnya produksi pertanian, hilangnya kesempatan petani, investasi pemerintah di bidang pengairan jadi tidak optimal, dan berkurangnya kesempatan petani. Oleh karena itu, kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat, serta harus dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien (Fauziah et al., 2018).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu gambaran mengenai elemen-elemen yang akan diatur secara sistematis berdasarkan telaah literatur. Kerangka pikir berguna dalam membentuk hipotesis sehingga dapat dianggap sebagai landasan bagi pembentukan hipotesis. Adapun teori yang digunakan yakni Dunn (2003), indikator evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Lebih jelas di uraikan dari bagan kerangka pikir berikut:

Bagan Kerangka pikir



Tabel 2. 1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk pembatasan fokus penelitian terkaitan dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian tentang Evaluasi Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa dengan menggunakan indikator Evaluasi kebijakan yaitu; Efektivitas, kecukupan, Kesetaraan , responsivitas dan ketepatan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah pemaparan dan rincian dari setiap aspek yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kejelasan dalam mengamati hal-hal tersebut. Berdasarkan fokus penelitian judul tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam evaluasi kebijakan mengacu pada sejauh mana penggunaan lahan sebagai tempat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai efektivitas suatu kebijakan antara lain;

- a. Tujuan Penggunaan Lahan: Penggunaan lahan untuk tempat wisata yang digunakan sesuai dengan kondisi dan ketersediaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong.
- b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang: Persentase penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- c. Kesesuaian dengan Rencana induk Pembangunan Kepariwisataan

2. Kecukupan

Kecukupan penggunaan lahan sebagai tempat wisata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Berikut adalah beberapa ukuran kecukupan yang dapat digunakan dalam evaluasi kebijakan:

- a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Lahan: Perbandingan antara luas lahan yang dialokasikan untuk penggunaan lahan sebagai tempat wisata dengan kebutuhan Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana: Indikator ini menilai apakah fasilitas fisik di lahan wisata cukup memadai untuk mendukung kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas wisata.

3. Kesetaraan

Kesetaraan akan mengevaluasi sejauh mana penggunaan lahan mendorong kesetaraan atau keadilan dalam distribusi dan akses terhadap lahan. Beberapa ukuran Kesetaraan yang dapat digunakan adalah:

- a. Aksesibilitas Lahan: Apakah masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses Lokasi wisata tersebut untuk mengukur seberapa merata akses masyarakat terhadap lahan.
- b. Dampak Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi lokal yang dihasilkan dari kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, atau peningkatan pendapatan Masyarakat yang ada di Kecamatan Tinggimoncong
- c. Kualitas Hidup Masyarakat: Perubahan dalam kualitas hidup Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong, mencakup akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,

yang dipengaruhi oleh kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata.

4. Responsivitas

Ukuran responsivitas dalam melakukan evaluasi kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata bertujuan untuk menilai sejauh mana dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan kondisi, serta merespons masukan dari berbagai kalangan. Berikut adalah beberapa ukuran responsivitas yang dapat digunakan:

- a. Partisipasi Masyarakat: Persentase Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan penggunaan lahan sebagai tempat wisata yang berpartisipasi dalam forum atau diskusi terkait kebijakan tersebut.
- b. Konflik penggunaan lahan: Jumlah kasus konflik yang terjadi akibat dari penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong.

5. Ketepatan

Ukuran ketepatan dalam melakukan evaluasi kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata bertujuan untuk menilai sejauh mana dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan kondisi yang dihadapi. Berikut adalah beberapa ukuran ketepatan yang dapat digunakan:

- a. Dampak Lingkungan: Penilaian terhadap dampak kebijakan penggunaan lahan untuk tempat wisata terhadap kualitas

lingkungan, termasuk aspek seperti kualitas udara, keberadaan ruang terbuka hijau, dan pelestarian ekosistem ini membantu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia tetapi juga menjaga lingkungan

- b. Ketepatan Sumber Daya: Sumber daya di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa terkhusus Lokasi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan kebijakana.
- c. Ketepatan Metode: Metode dan strategi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata sesuai dengan tujuan dan kondisi di wilayah Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Peneliti akan melaksanakan penelitian ini dalam tempo kurang lebih dua bulan setelah peneliti memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan untuk melaksanakan penelitiannya. Adapun pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa karena merupakan salah satu daerah dengan potensi sumber daya alam yang memadai terkhusus penggunaan lahan untuk tempat wisata. Maka dari itu perlu kiranya melakukan penelitian di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan yang disertai dengan gambar atau foto dari objek penelitian tersebut. Penelitian ini di landaskan pada teori dan konsep selaku pemandu supaya fokus riset cocok dengan kenyataan di lapangan.

2. Tipe Penlitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi kasus metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam bagaimana

kebijakan penggunaan lahan berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tertentu yang dijadikan objek wisata. Dengan studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, masyarakat setempat, dan wisatawan), observasi lapangan, serta dokumentasi terkait kebijakan. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar.

C. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui wawancara. Data primer diperoleh dari hasil survei di lokasi penelitian secara langsung dari institusi-institusi terkait di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa seperti Kantor Kecamatan Tinggimoncong, pengelola tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong serta Masyarakat Kecamatan Tinggimoncong.

2. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh melalui penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun dari beberapa berkas-berkas penting lainnya yang dapat mendukung data primer yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi terkait situasi dan kondisi yang sesuai dengan judul penelitian tersebut yaitu **“Evaluasi Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”** sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Informan Penelitian

Yogyakarta	Informan
1	Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang Kab gowa
2	Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa
3	Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong
4	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data – data penelitian dari sumber data.

Teknik pengumpulan data merupakan suatu tahapan penting dalam sebuah penelitian, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Dengan penjelasan di atas maka, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian dalam hal ini observasi di fokuskan pada dampak lingkungan, dampak sosial dan dampak ekonomi dari penggunaan lahan sebagai tempat wisata.

Prosedur observasi membuat catatan lapangan yang mencatat situasi yang diamati secara terperinci, dilengkapi dengan foto atau video menggunakan panduan observasi untuk memastikan konsistensi dalam pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dan yang menjadi responden dari penelitian ini adalah pemerintah daerah, pengusaha atau pemilik wisata dan Masyarakat sekitar Lokasi wisata.

Prosedur wawancara menyiapkan pertanyaan terbuka dan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam informasi dan untuk menghindari kehilangan hasil wawancara di perlukan alat perekam dan membuat catatan penting selama wawancara.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi, sumber terdiri dari dokumen yang berupa RTRW, Peraturan Daerah, laporan dampak lingkungan (AMDAL), dan berita atau artikel terkait kebijakan penggunaan lahan yang dapat di peroleh dari website resmi pemerintah daerah dan untuk lebih rinci langsung ke kantor instansi terkait.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Semua data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis. Menurut Sugiyono (2017), langkah-langkah dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Maka teknik analisis data yang di gunakan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Proses ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Tujuan reduksi data adalah untuk memfokuskan data pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Paparan Data

Pemaparan data adalah proses menyajikan informasi atau hasil yang diperoleh dari penelitian dengan cara yang sistematis dan jelas. Ini melibatkan pengorganisasian, interpretasi, dan penyajian data agar mudah dipahami dan dapat mendukung temuan atau kesimpulan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses mengambil hasil yang diperoleh dari analisis data dan menghasilkan suatu simpulan atau generalisasi yang didasarkan pada temuan tersebut. Ini merupakan tahap kritis dalam proses penelitian yang memungkinkan peneliti untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu Teknik yang disebut triangulasi. Triangulasi dalam melakukan pengujian kredibilitas dapat diartikan yaitu pengecekan data-data dari berbagai sumber yang diambil oleh peneliti dengan melakukan macam-macam cara dan berbagai waktu yang ditentukan peneliti (Sugiyono, 2017).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber yaitu teknik yang digunakan dalam melakukan pengujian kredibilitas dari data. Diterapkan dengan mengecek data penelitian yang didapat dari sumber-sumber yang telah ditentukan oleh peneliti.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah cara dalam menguji kredibilitas data, teknik ini dilakukan dengan mengecek data-data terhadap sumber data yang telah ditentukan peneliti dengan cara yang berbeda dari cara sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Salah satu yang mempengaruhi kredibilitas sebuah penelitian adalah waktu. Data yang telah terkumpul sebelumnya melalui teknik wawancara misalnya pada pagi hari, kemudian narasumber masih dalam keadaan jasmani yang segar, belum banyak terjadi masalah, maka data yang dia berikan akan lebih valid sehingga data akan lebih kredibel. Sehingga untuk melakukan pengujian kredibilitas terhadap data dapat dilakukan

melalui cara yakni melakukan pengecekan dengan bentuk wawancara, observasi dan teknik-teknik lain di waktu atau disituasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan sebuah data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan secara berulangulang agar dapat menemukan kepastian data penelitiannya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 2.883,33 km². Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Makassar di sebelah barat, Kabupaten Takalar di sebelah selatan, Kabupaten Sinjai di timur, dan Kabupaten Maros di utara. Secara administratif, Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, yang salah satunya adalah Kecamatan Tinggimoncong.

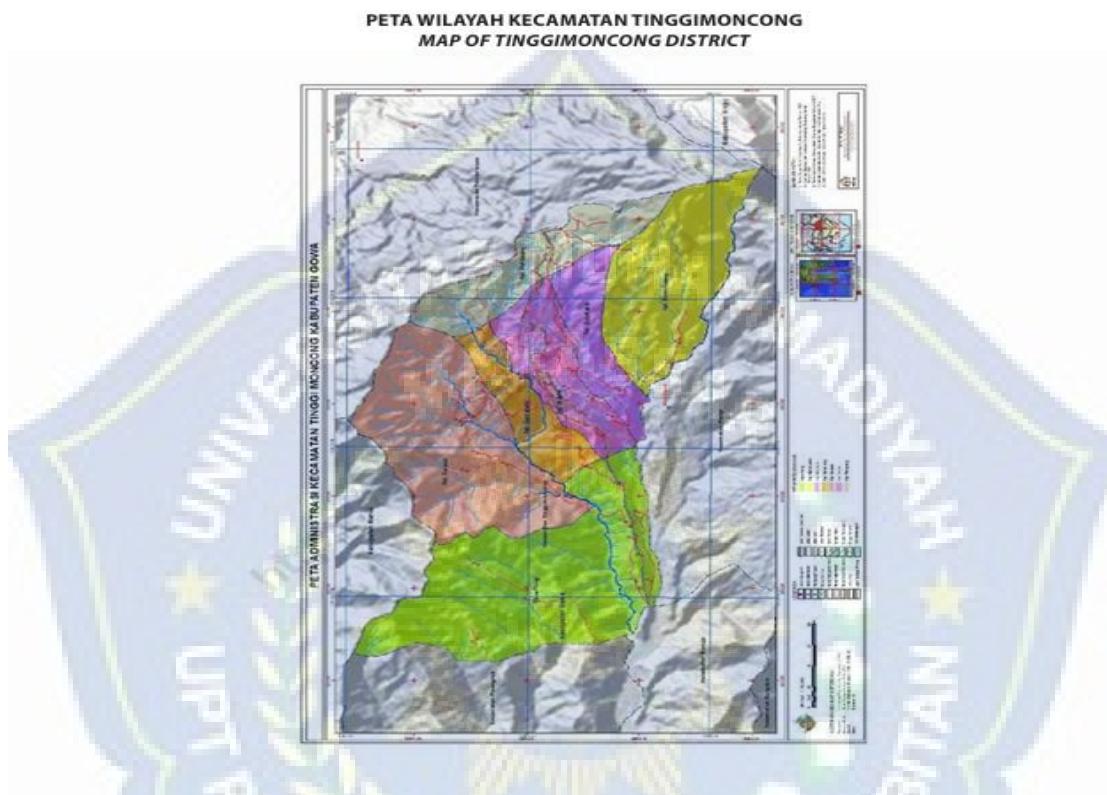
Kabupaten Gowa memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, terutama di wilayah dataran tinggi yang memiliki panorama alam indah dan udara yang sejuk. Pemerintah Kabupaten Gowa secara bertahap telah mengembangkan kebijakan pemanfaatan lahan untuk sektor pariwisata, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat serta menjaga kelestarian lingkungan.

2. Kecamatan Tinggimoncong

Kecamatan Tinggimoncong terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan merupakan salah satu wilayah dengan potensi wisata alam terbesar di daerah tersebut. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat sekitar **5°16' – 5°23' LS dan 119°52' – 120°02' BT**. Secara administratif, Kecamatan Tinggimoncong berbatasan dengan: **Sebelah Utara:** Kabupaten Maros, **Sebelah Selatan:** Kecamatan Parigi dan

Kabupaten Sinjai, **Sebelah Barat**: Kecamatan Parangloe, **Sebelah Timur**: Kecematah Tombolo Pao.

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kecamatan Tinggimoncong



Luas wilayah Kecamatan Tinggimoncong tercatat 142,87 km persegi atau sekitar 7,52 persen dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan. Kecamatan Tinggimoncong terdiri dari 7 desa/kelurahan, yaitu Desa Parigi, Desa Bulutana, Desa Bontolerung, Desa Pattapang, Desa Malino, Desa Gantarang, Desa Garassi. Topografi dan Iklim, Parigi dengan luas 48,94 km persegi. Sedangkan, desa/kelurahan dengan luas terkecil adalah Gantarang dengan luas 11,5 km persegi.

3. Kondisi Topografi Kecamatan Tinggimoncong

Tinggimoncong memiliki topografi berbukit dan pegunungan, dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian ini menjadikan kawasan ini memiliki udara yang sejuk dengan suhu berkisar antara 15°C – 25°C sepanjang tahun. Kecamatan ini termasuk dalam zona hutan hujan tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. sehingga kondisi iklim ini mendukung pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, termasuk hutan pinus, perkebunan teh, dan aneka tanaman hortikultura seperti stroberi dan sayuran dataran tinggi, dan juga memiliki pemandangan alam yang menawan, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam dan agro-wisata.

3. Kondisi Demografi

Penduduk Kecamatan Tinggimoncong tahun 2023 tercatat sebanyak 23.667 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 11.875 jiwa laki-laki dan 11.792 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 101 angka ini menunjukkan bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 101 penduduk laki-laki. Dengan luas wilayah 142,87 km², maka kepadatan penduduk di Kecamatan Tinggimoncong yaitu 166 jiwa per Kilometer persegi. Desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu desa/kelurahan Malino dengan 379 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah adalah desa/kelurahan Garassi yaitu 77 per kilometer persegi.

4. Potensi Wisata Kecamatan Tinggimoncong

Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu destinasi unggulan di dataran tinggi Kabupaten Gowa yang cukup mudah diakses dari Kota Makassar. Dengan jarak sekitar 90 kilometer, perjalanan ke kawasan ini dapat ditempuh dalam waktu 2,5 hingga 3 jam menggunakan kendaraan pribadi maupun umum. Jalur utama yang menghubungkan Makassar ke Tinggimoncong adalah Jalan Poros Malino, sebuah jalan beraspal yang membentang melintasi pegunungan dan perkebunan, menyuguhkan pemandangan hijau nan asri sepanjang perjalanan. Dalam beberapa tahun terakhir, jalan ini telah mengalami berbagai peningkatan, baik dari segi perkerasan maupun pelebaran, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menunjang aksesibilitas menuju kawasan wisata dan mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lokal.

Letaknya yang strategis, berpadu dengan udara sejuk dan lanskap alam yang memesona, menjadikan Tinggimoncong khususnya Kelurahan Malino sebagai magnet wisata yang terus berkembang. Pemerintah Kabupaten Gowa, melalui kebijakan penataan ruang, secara resmi menetapkan Kecamatan Tinggimoncong sebagai kawasan strategis pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dan agrowisata, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa Tahun 2012–2032. Kebijakan ini menandai pergeseran orientasi pemanfaatan ruang dari sektor pertanian tradisional menuju sektor pariwisata yang dinilai lebih potensial secara ekonomi.

Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, terjadi perubahan signifikan dalam penggunaan lahan di berbagai wilayah desa dan kelurahan. Lahan-lahan pertanian yang dulunya ditanami hortikultura, seperti sayur-mayur dan tanaman bunga, kini mulai dialihfungsikan menjadi lahan komersial yang menunjang aktivitas pariwisata. Di sejumlah titik, berdiri villa-villa mewah, restoran bertema alam, taman selfie, serta akomodasi modern yang menawarkan pengalaman menginap di tengah kesejukan pegunungan. Meski hal ini membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kunjungan wisatawan, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan, seperti potensi konflik lahan, degradasi lingkungan, serta ketimpangan manfaat antara investor dan masyarakat lokal..

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diuraikan dari jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Informan yang diwawancarai dalam penelitian merupakan narasumber yang menjadi pihak yang terpengaruh secara langsung oleh kebijakan tersebut. Dan Pemaparan dalam bab ini akan dilakukan dengan menguraikan jawaban dari rumusan masalah.

1. Efektivitas Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata

Berdasarkan Efektivitas kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong dianalisis melalui tiga sub indikator, yaitu kesesuaian penggunaan lahan dengan tujuan peruntukannya, kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta

kesesuaian terhadap Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARD). Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuan yang dirumuskan serta sesuai dengan perencanaan ruang dan dokumen strategis pariwisata.

a. Tujuan Penggunaan Lahan

Dalam rangka menilai sejauh mana penggunaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong telah sesuai dengan tujuannya sebagai kawasan wisata, dilakukan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gowa. Informasi dari pihak teknis ini sangat penting karena mereka merupakan institusi yang terlibat langsung dalam pengaturan dan pengawasan penggunaan ruang wilayah. Dinas PUPR memberikan gambaran bahwa penggunaan lahan di wilayah tersebut telah mengikuti karakteristik geografis serta mendukung aktivitas wisata alam dan agro. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara potensi wilayah dan orientasi kebijakan pemanfaatan lahan. Berikut kutipan wawancara dengan Staff Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa :

“Penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong pada dasarnya cukup sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah. Wilayah ini didominasi oleh kontur perbukitan, suhu yang sejuk, dan lanskap alam yang menarik, yang merupakan faktor utama daya tarik wisata alam.” (Hasil Wawancara, AH, 3 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan untuk kegiatan wisata di Kecamatan Tinggimoncong telah efektif dalam mengakomodasi potensi wilayah. Karakteristik alam yang meliputi perbukitan, iklim sejuk, dan keindahan lanskap dimanfaatkan dengan tepat untuk mendukung pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian. Hal ini menandakan bahwa kebijakan penggunaan lahan telah mencapai tujuannya secara umum.

Dilanjutkan oleh Kabid Pengembangan Destinasi Wisata Pada Dinas Pariwisata terkait tujuan penggunaan lahan untuk tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong dengan karakteristik wilayahnya. Hasil wawancara sebagai berikut:

“Kebijakan penggunaan lahan wisata sudah cukup sesuai dengan karakteristik Kecamatan Tinggimoncong yang merupakan daerah perbukitan yang sejuk . Mereka yang ingin membangun tempat wisata perlu menyesuaikan dengan lokasi dan kondisi alam setempat, sehingga masih banyak peluang untuk mengembangkan potensi wisata di daerah tersebut”.(Hasil Wawancara, JT. 6 Februari 2025)

Hal ini menunjukkan potensi yang dimiliki oleh wilayah Kecamatan Tinggimoncong secara umum sesuai untuk pengembangan daerah wisata yang memiliki potensi alam dan budaya yang menarik ditambah dengan suhu yang sejuk dan pemandangan yang memadai untuk pengembangan wisata berkelanjutan.

Hal yang sama disampaikan oleh pemerintah kecamatan mengenai potensi dan karakteristik wilayah di Kecamatan

Tinggimoncong untuk pengembangan wisata. Dalam hasil wawancara disampaikan

“Secara umum, cukup sesuai sama karakter Tinggimoncong yang memang daerah perbukitan dan cocok buat pengembangan wisata alam. Pihak kecamatan juga berusaha selektif memilih lokasi yang benar-benar layak untuk dijadikan wisata” (Hasil Wawancara, AR. 21 Maret 2025)

Ini menujukan dari hasil wawancara di atas menujukan bahwa potensi dan karakteristik wilayah Kecamatan Tinggimoncong memang sesusai untuk pengembangan Kepariwisataan merujuk pada Lokasi yang memungkinkan berada di dataran tinggi dengan pemandangan yang indah udara yang sejuk serta budaya Sejarah yang menarik untuk dikembangkan baik untuk wisata alam, agrowisata, dan wisata budaya.

Berikut data tempat wisata yang berada di Kecamatan Tinggimoncong sesuai dengan rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Gowa tahun 2021-2035.

Tabel 4. 1 Data Tempat Wisata Di Kecamatan Timoncong Dari RIPPDA Tahun 2021- 2035

No	Tempat Wisata	Lokasi
1	Lembah Ramma	Kelurahan Bontolerung
2	Air Terjun Lembanna	Kelurahan Pattapang
3	Hutan Pinus Lembanna	Kelurahan Pattapang
4	Kebun Stroberi	Kelurahan Pattapang
5	Hutan Pinus Malino	Kelurahan Malino
6	Malino Highland	Kelurahan Pattapang
7	Lembah Hijau	Kelurahan Malino
8	Air Terjun Parangbugisi	Kelurahan Buluttana
9	Air Terjun Ketemu Jodoh	Kelurahan Bontolerung
10	Lembah Biru	Kelurahan Malino
11	Air Terjun Takapala	Kelurahan Bontolerung

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Gowa 2021-2035

Tabel di atas menunjukan ada 11 tempat wisata yang telah terdaftar dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2035.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan ada beberapa Lokasi tempat wisata di Kecamatan Tingimoncong yang belum masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten gowa di antaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Data Tempat Wisata Yang belum Terdaftar Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gowa

No	Tempat wisata	Lokasi
1	Sierra sky view	Kelurahan pattapang
2	Malino hills	Kelurahan bontolerung
3	Goa jepang malino	Kelurahan buluttana
4	Malino valley	Kelurahan bontolerung
5	Air terjun bekuda	Kelurahan bontolerung
6	Air terjun biroro	Kelurahan bontolerung
7	Air terjun bahagia	Kelurahan buluttana

8	Air terjun balang bulang	Kelurahan gantarang
9	Taman bunga hortensia	Kelurahan malino
10	The river taman rekresi malino	Kelurahan malino
11	Danau slank	Kelurahan bontolerung
12	Bukit jobar	Kelurahan bontolerung
13	Air terjun salewagang	Kelurahan malino
	Kampoeng eropa malino	Kelurahan malino

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan ada 13 tempat wisata yang belum masuk dalam dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten gowa.

b. Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah

Selanjutnya kesesuaian antara lokasi pengembangan wisata dengan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan hal krusial dalam menilai legalitas dan kepatuhan kebijakan terhadap peraturan perundangan. Dalam wawancara dengan Dinas PUPR, terungkap bahwa sebagian besar wilayah wisata di Kecamatan Tinggimoncong sudah berada dalam zona yang sesuai dengan RTRW, meskipun masih terdapat sebagian yang belum memiliki legalitas formal. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kasi tata ruang Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Gowa sebagai berikut:

“Sebagian besar wilayah Kecamatan Tinggimoncong sudah masuk dalam kawasan pengembangan pariwisata. Sekitar 70% dari lokasi-lokasi wisata saat ini sudah sesuai dengan zonasi dalam RTRW. Namun, masih ada sekitar 30% lahan yang belum termasuk zona wisata secara legal tetapi sudah dimanfaatkan. Ini terjadi karena adanya percepatan inisiatif lokal dalam mengembangkan destinasi baru sebelum melalui proses revisi tata ruang dan sampai sekarang kami belum menyusun untuk Rencana Datail Ruang Wilayah untuk Kecamatan Tinggimoncong.” (Hasil Wawancara, AH. 3 Maret 2025).

Meskipun mayoritas kawasan wisata telah sesuai dengan zonasi RTRW, adanya sekitar 25–30% kawasan yang belum memiliki legalitas zonasi menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam perencanaan spasial yang mana harus di atur dalam Rencana Detail Ruang Wilayah maka perlu perhatian percepatan pembuatan kebijakan agar Pembangunan tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong mampu berdakap baik bagi Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong.

Lebih lanjut di terangkan bagaimana kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Tinggimoncong oleh Kabid pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Tapi memang harus diakui bahwa tidak semua lokasi wisata yang tumbuh saat ini terdaftar secara resmi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Beberapa kawasan berkembang lebih cepat dibanding pembaruan dokumen perencanaan”. (Hasil Wawancara, JT 6 Februari 2025)

Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya optimal dari sisi kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan belum bisa mengikuti pertumbuhan Pembangunan pariwisata saat ini.

Ini menujukan hasil pengawasan dan perkembangan Pembangunan tempat wisata lebih cepat dari pada perkembangan peraturan atau kebijakan yang ada karena selama 2 tahun hanya ada 2

tempat wisata yang masuk dalam rekomendasi Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa.

c. Kesesuaian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Rencana induk pembangunan pariwisata merupakan pedoman strategis pengembangan pariwisata yang dirancang untuk menciptakan kesinambungan dan keterpaduan antara potensi daerah dan pembangunan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa menyampaikan bahwa arah pengembangan wisata di Kecamatan Tinggimoncong sudah sejalan dengan Rencana induk Pembangunan parwisata, meskipun terdapat kelemahan dalam implementasi seperti lemahnya koordinasi antar lembaga. Seperti yang disampaikan oleh Staff Pengembangan destinasi Wiasta pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa sebagai berikut :

"Kegiatan pariwisata di Tinggimoncong umumnya sudah sesuai dengan arah pengembangan dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Gowa. Fokus utama Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Gowa adalah pada pengembangan wisata berbasis alam, budaya, dan pertanian, yang memang banyak dijumpai di wilayah ini. Meski demikian, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya terintegrasi , terutama dalam hal kelembagaan dan pembinaan destinasi." (Hasil Wawancara, JT. 6 Februari 2025).

Secara umum, pengembangan pariwisata telah sesuai dengan visi dan arah pembangunan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata . Namun demikian, efektivitas implementasinya masih terganggu oleh lemahnya koordinasi dan pembinaan, yang dapat menghambat pencapaian target jangka panjang pembangunan pariwisata.

Selanjutnya pihak pemerintah kecamatan menegaskan Kembali terkait dengan sinkronya Pembangunan yang ada dengan Rencana induk pembanguna pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong hasil wawancara sebagai berikut:

“Secara umum, program-program pengembangan wisata yang dijalankan sudah merujuk pada RIPPARDA. Tapi memang kami masih belum maksimal dalam pengawalan karena kekurangan tenaga kerja di pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan Lokasi wisata yang ada. (Hasil Wawancara, AR, 21 Maret 2025)

Hal ini menunjukan bahwa dalam hal pengawasan dan penijauan dari pihak pemerintah masih belum maksimal. Di karenakan ada belum adanya data yang konkret tentang data Lokasi wisata yang ada di Kecamatan Tinggimoncong. Berikut adalah data hasil rekomendai dinas pariwisata terkait pengurusan izin Pembangunan tempat wisata tahun 2022-2024

Tabel 4. 3 Rekomendasi Tempat Wisata Baru Yang Di Keluarkan Dinas Pariwisata Tahun 2022-2024

NO	TEMPAT WISATA	LOKASI
1	Pemandian Lambiria	Kecamatan Tompobulu
2	Malino Wonderland	Kecamatan Tinggimoncong
3	PT. Al Fath Syariah Indonesi	Kecamatan Pattallassang
4	Villa Ebony/ PT. Bukit Milenial	Kecamatan Tinggimoncong
5	Rumah Kebun Dennassa	Kecamatan Bontonompo
6	CV. Citra Satwa Celebes	Kecamatan Bontomarannu
7	CV. Aiayah Group (Jonjo Adventure Tourism)	Kecamatan Parigi
8	Wisata Edukasi 2B One	Kecamatan Parangloe
9	Taman Wisata Bumdes Beekah	Kecamatan Bontonompo
10	Air Terjun Depa	Kecamatan Bungaya

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2022-2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukan ada 10 rekomendasi yang di keluarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa selama tahun 2022 sampai tahun 2024 dan 2 di antaranya berada di wilayah Kecamatan Tinggimoncong

Berdasarkan hasil wawancara dan perolehan data untuk mengukur efektivitas kebijakan yakni tujuan penggunaan lahan untuk tempat wisata memang memungkinkan dengan kondisi dan karakteristik wilayah Kecamatan Tinggimoncong. Namun kesesuaian rencana tata ruang dan rencana induk pembangunan kepariwisataan masih perlu pengawasan yang optimal.

Berdasarkan dengan tujuan rencana induk Pembangunan Kepariwisataan daerah Kabupaten Gowa tahun 2021-2035 pasal 5 (a).

membangun dan mendorong citra Pariwisata Daerah sebagai pusat destinasi alam dan budaya Makassar di pulau Sulawesi. Dan juga Pasal 6 (a). mengembangkan pusat destinasi Wisata alam dan budaya yang unggul. Masih perlu pengoptimalan dari segi pengawasan

2. Kecukupan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata

Evaluasi terhadap kecukupan kebijakan difokuskan pada sejauh mana alokasi lahan dan sarana prasarana yang tersedia telah memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata. Kecukupan dalam konteks ini berarti terpenuhinya kebutuhan dasar secara kuantitatif maupun kualitatif agar kegiatan wisata dapat berjalan optimal.

a. Aksesibilitas dan Ketersediaan Lahan

Alokasi untuk penggunaan lahan penting perlu diperhitungkan karena menyangkut keberlanjutan dan pelestarian lingkungan di Kecamatan Tinggimoncong. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah Kecamatan Tinggimoncong sebagai berikut:

“Penggunaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong berjalan dengan mengikuti aturan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan Rencana Induk Pariwisata. Kedua aturan ini harus jalan beriringan dan sinkron. Dari pihak kecamatan sendiri, mereka sudah mengusulkan beberapa lokasi yang dianggap layak dijadikan tempat wisata, termasuk beberapa yang berada di kawasan hutan”. (Hasil Wawancara, AR. 21 Maret 2025)

Luas lahan yang dialokasikan untuk kegiatan wisata merupakan indikator penting untuk mengukur kapasitas wilayah dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dinas PUPR menyampaikan bahwa

sekitar 5–10% dari luas Kecamatan Tinggimoncong telah didedikasikan untuk kegiatan wisata. Angka ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah dalam mengembangkan sektor wisata, meskipun secara kuantitatif masih terbatas jika dibandingkan dengan total luas wilayah.

"Berdasarkan dokumen tata ruang dan pengamatan lapangan, sekitar 5% sampai 10% dari total luas wilayah Kecamatan Tinggimoncong telah digunakan atau dialokasikan untuk kegiatan wisata namun masih masuk kategori Pemukiman". (Hasil Wawancara, AH. 3 Maret 2025).

Berikut data tutupan lahan yang memberikan Gambaran umum penggunaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong secara menyeluruh.

Tabel 4 4 Data Tutupan lahan Kecamatan Tinggimoncong tahun 2024

No	Kategori Tutupan Lahan	Estimasi Luas (%)
1	Hutan Primer & Sekunder	50–60%
2	Kebun Campuran	15–20%
3	Sawah	5–10%
4	Permukiman	5–10%
5	Lahan Terbuka (Semak/Belukar)	5–10%
6	Badan Air (Sungai, Danau)	<1%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa

Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong berada di 5- 10 % dari 100% lahan yang ada di Kecamatan Tinggimoncong.

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan keberlanjutan dari pada penggunaan lahan yang di

gunakan untuk tempat wisata meskipun belum optimal sepenuhnya dan masih perlu pengawasan dan pemeliharaan yang berlanjut untuk.

b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, air bersih, toilet umum, dan tempat sampah sangat mempengaruhi kenyamanan pengunjung dan kelangsungan wisata. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa destinasi wisata utama seperti Malino memiliki fasilitas yang relatif memadai. Namun, sebagian besar destinasi baru belum memperoleh perhatian yang sama. Dinas Pariwisata dan masyarakat sama-sama mengeluhkan minimnya fasilitas pendukung.

"Sarana penunjang seperti toilet umum, tempat parkir dan papan informasi masih minim di banyak destinasi" (Hasil Wawancara, JT. 6 Februari 2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa masih perlu pengawasan yang lebih terkait dengan fasilitas pendukung untuk tempat wisata agar kenyamanan wisatawan itu bisa terpenuhi secara merata.

Lebih lanjut fasilitas yang perlu di perhatikan dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas wisata yaitu adalah ketersedian penampungan sampah yang memadai. Dalam hasil wawancara dengan Masyarakat menyatakan bahwa:

"Salah satunya limbah sampah dan sejauh ini belum ada tempat pembuangan akhir. Pengendalian ruang juga penting karena kita lihat kalau hari libur biasa terjadi kemacetan" (Hasil Wawancara, RD. 12 Mei 2025).

Secara keseluruhan untuk mengukur kecukupan penggunaan lahan untuk tempat wisata berdasarkan, ketersediaan sarana dan prasarana masih belum merata di semua destinasi wisata. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kecukupan infrastruktur, kebijakan masih memerlukan penguatan agar seluruh kawasan wisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Kemudian kebijakan juga belum cukup menjawab tantangan infrastruktur, seperti akses jalan yang masih menimbulkan kemacetan, terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum cukup mendukung kebutuhan masyarakat dan dinamika wisata yang berkembang dan beberapa hal yang perlu adalah tempat pengelolaan sampah yang perlu di perbaikan. Dari hasil yang di peroleh dan berdasarkan rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah pasal 13 tentang parasarana pendukung pada poin (a) Penyediaan pusat informasi wisatawan skala kabupaten yang menediakan semua informasi penting terkait objek wisata di daerah. Belum sepenuhnya terpenuhi di skala kecamatan.

Berikut data sarana dan prasarana akomodasi dan transportasi di Wilayah Kecamatan Tinggimoncong untuk penunjang industri pariwisata yang ada di Kecamatan Tinggimoncong sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Data Sarana dan Prasarana Akomodasi Transportasi dan Komunikasi Kecamatan Tinggimoncong

No	Nama	Keterangan	Jumlah
1.	Villa/Penginapan		130
2.	Hotel		5
3.	Infrastruktur jalan	Beton/Aspal	Jalur darat
4.	Menara telpon seluler		9
5.	Operator Layanan Komunikasi Telepon Seluler		27

Sumber: Tinggimoncong dalam angka tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas bahwa sarana dan prasarana di kecamatan Tinggimoncong untuk akomodasi, transportasi dan komunikasi memupuni untuk mendukung perkembangan periwisata di Kecamatan Tinggimoncong. Namun berdasarkan hasil wawancara yang menunjukan bahwa ada beberapa sarana dan prasarana yang harus disediakan seperti pembuangan atau tempat pengelolahan sampah limbah hasil aktivitas wisata dan juga informasi terkait dengan wisata seperti web atau papan informasi dan juga penataan tempat parkir sehingga tidak menyebabkan kemacetan.

3. Kesetaraan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata

Indikator kesetaraan digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat dan akses terhadap pengembangan wisata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Fokus utamanya mencakup akses masyarakat ke lokasi wisata, dampak ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup.

a. Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Penggunaan Lahan

Akses terhadap kawasan wisata merupakan syarat dasar dalam menciptakan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya lokal. Berdasarkan wawancara dengan salah satu Masyarakat , akses masyarakat sebagai pengunjung relatif terbuka. Namun, untuk menjadi pelaku usaha, masih terdapat hambatan, terutama terkait pengetahuan peruntukan lahan. Dari hasil wawancara dari pihak Masyarakat menyampaikan sebagai berikut:

"Untuk menjadi pelaku usaha wisata terbuka namun karena beberapa masyarakat belum paham peruntukan lahannya untuk apa kalau bukan untuk kebun tempat bertani atau di biarkan saja kalau soal peluang jadi tenaga kerja memang ada tapi itu pun tidak semua." (Hasil Wawancara RD, 12 Mei 2025).

Meskipun masyarakat memiliki akses terbuka sebagai pengunjung, masih ada kendala informasi dan keterampilan dalam mengakses peluang usaha. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan peran dalam pembangunan wisata belum sepenuhnya terwujud.

Selanjutnya dalam hal akses Masyarakat untuk penggunaan lahan sebagai tempat wisata disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Tinggimoncong dalam hasil wawancara berikut:

"Akses masyarakat masih cukup terbuka. Banyak masyarakat yang terlibat langsung dalam membangun tempat wisata bahkan masuk dalam Kawasan hutan. Tapi, pembangunan itu tetap bertahap dan diusahakan supaya fungsi hutan tetap terjaga, nggak dirusak total". (Hasil Wawancara, AR. 21 Maret 2025)

Dari hasil wawancara di atas menujukan bahwa akses Masyarakat untuk ikut dalam berkonstribusi cukup terbuka namun Sebagian

masyarakat belum paham dan tentang peruntukan lahan dan sebagainya maka perlu pelatihan atau semacamnya sehingga pembangun industry pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong makin terarah dan semua Masyarakat mampu merasakan dampak positifnya.

b. Pertumbuhan ekonomi lokal

Sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian lokal. Dinas Pariwisata mencatat adanya pertumbuhan usaha kecil. Namun, masyarakat masih mendominasi sebagai tenaga kerja daripada pemilik usaha.

"Kami mencatat ada peningkatan jumlah usaha kecil di sekitar objek wisata seperti". (Hasil Wawancara, JT. 6 Februari 2025)

Dampak ekonomi dari sektor pariwisata telah mulai dirasakan oleh masyarakat, tetapi belum secara merata. Perlu kebijakan afirmatif agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi buruh, tetapi juga pelaku utama ekonomi wisata.

Distribusi manfaat dari dijadikannya kecamatan Tinggimoncong sebagai daerah pengembangan industry pariwisata ini memberikan juga peluang bagi Masyarakat yang mempunyai akses yang dekat dengan pusat wisata. hal ini disampaikan oleh pihak pemerintah Kecamatan Tinggimoncong dalam hasil wawancara berikut:

"Dampak sosial ekonomi cukup positif karena aktivitas ekonomi masyarakat meningkat. Bahkan di hari biasa pun tempat wisata tetap ramai di kelurahan Malino karna pusat pengembangan wisata dan juga sebagai ibu kota Kecamatan". (Hasil Wawancara, AR. 21 Maret 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan wisata belum sepenuhnya merata dan dirasakan oleh seluruh Masyarakat kerna hanya beberapa Lokasi atau wilayah di Kecamatan Tinggimoncong yang menjadi pusat pengembangan industri wisata.

Berikut adalah data perbandingan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Tinggimoncong dari tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 4.6 Data Pertumbuhan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024

Indikator Ekonomi	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	23.331 jiwa	23.667 jiwa	24.065 jiwa
Jumlah Rumah Tangga	4.500	4.600	4.700
Persentase RT dengan Akses Listrik	85%	88%	90%
Persentase RT dengan Akses Air Bersih	70%	75%	80%
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	>1.200	>1.300	>1.400
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65%	67%	69%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5%	4.5%	4%
Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan	Rp1.200.000	Rp1.300.000	Rp1.400.000

Sumber:Kecamatan Tinggimoncong Dalam Angka Tahun 2022-2024

Ini menunjukkan pertumbuhan penduduk semakin meningkat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi setidaknya 3 % pertumbuhan umkm meningkat dari 3 tahun belakang ini dan angka pengangguran juga menurun.

Selanjutnya kontribusi pariwisata dalam Pembangunan kabupaten gowa bisa di lihat dari berapa pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan wisatawan yang ada di kecamatan tinggimoncong. Bisa kita lihat pada data table berikut:

Tabel 4. 7 Data Realiasi Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2025

Tahun	Target Kontribusi PDRB (%)	Realisasi Kontribusi (%)	Capaian (%)	Nilai Ekonomi Event Unggulan	Pertumbuhan Wisata	Anggaran Program Pariwisata (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
2023	2,22%	2,63%	118,4%	-	-	-	-
2024	2,85%	2,79%	97,89%	Rp5.151.200.000 (Beautiful Malino)	Wisatawan +9,2%; Hunian +8%; Usaha Wisata +11,4%	Rp1.023.662.265	99,93 %

Sumber: LKJIP Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2025

Tabel diatas menunjukan bahwa penikatan pendapatan daerah dari industry pariwisata sangat besar berdasarkan laporan kinera instansi pemerintah Daerah Tahun 2025 dari Dinas Pariwisata.

c. Kualitas Hidup Masyarakat

Peningkatan kualitas hidup menjadi indikator kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Menurut Dinas PUPR, terjadi peningkatan taraf hidup di beberapa desa wisata. Seperti yang di tegaskan oleh Staff Tata Ruang Pada Dinas Perencanaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Sebagai berikut:

"Terjadi peningkatan kualitas hidup di beberapa desa yang dekat dengan lokasi wisata" (Hasil Wawancara, AH. 3 Maret 2025).

Kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan wisata mengalami peningkatan. Namun, peningkatan ini belum merata ke seluruh wilayah, sehingga upaya pemerataan masih sangat diperlukan. Berdasarkan data yang di ambil dari Bada Pusat Statistik berikut tabel indicator yang mengukur kualitas Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong:

Tabel 4. 8 Data Indikator kualitas hidup Masyarakat Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2023

Aspek	Indikator	Standar	Data
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	≥ 9 tahun	RLS Kabupaten Gowa: 8,5 tahun
Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	≥ 13 tahun	HLS Kabupaten Gowa: 13,2 tahun
Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun	$\geq 95\%$	APS Kabupaten Gowa: >95%
Pendidikan	Ketersediaan fasilitas pendidikan	Tersedia SD/SMP per desa; guru tersertifikasi	Beberapa SD/SMP tersedia; pelatihan guru dan pembangunan kelas berlanjut
Ekonomi	Persentase penduduk miskin	<10%	Penduduk miskin Kabupaten Gowa: 9,2%
Ekonomi	PDRB per kapita (harga berlaku)	>Rp40 juta	PDRB per kapita Gowa: ±Rp45 juta
Ekonomi	Sumber mata pencaharian utama	Diversifikasi: pertanian, perdagangan, jasa, UMKM	Pertanian hortikultura, perdagangan

Ekonomi	Program ekonomi	Dukungan UMKM, pelatihan, agrowisata, akses modal	Agrowisata, pelatihan UMKM, akses kredit
Kesehatan	Umur Harapan Hidup	≥ 70 tahun	Umur harapan hidup: 70,5 tahun
Kesehatan	Prevalensi stunting	$<20\%$	Prevalensi stunting: $\pm 20\%$
Kesehatan	Cakupan vaksinasi dasar (anak dan dewasa)	$>90\%$	Cakupan vaksinasi dasar: $>90\%$
Kesehatan	Akses layanan kesehatan dasar	Minimal 1 puskesmas per kecamatan + posyandu per dusun	Puskesmas dan posyandu tersedia; layanan ibu & anak rutin
Infrastruktur	Akses jalan	100% desa terhubung jalan kabupaten/provinsi	Sebagian besar desa terhubung jalan kabupaten/provinsi
Infrastruktur	Rasio elektrifikasi	$\geq 98\%$	Hampir 100% (PLN dan PLTS)
Infrastruktur	Akses air bersih	$\geq 90\%$	PDAM dan sumur bor/pompa desa
Infrastruktur	Akses internet dan telekomunikasi	Jaringan seluler stabil, internet minimal 3G	Layanan seluler & internet tersedia; kualitas terbatas di desa terpencil

Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat terkait dengan taraf hidup Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong memang mengalami peningkatan tapi belum merata dan diraskan oleh semua masyarakat Tinggimoncong. Ketimpangan distribusi manfaat pariwisata cukup mencolok. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar keuntungan ekonomi dari sektor wisata kembali ke pemilik modal, bukan kepada masyarakat lokal. Walaupun peluang kerja meningkat,

masyarakat tidak secara merata menikmati dampak positif dari kebijakan ini. Hal ini disampaikan oleh salah satu Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong berikut hasil wawancaranya:

“Memang Sebagian masyarakat mendapatkan manfaatnya seperti membuka warung kecil atau terlibat sebagai tenaga kerja...tetapi untuk membuka tempat wisata memang perlu izin yang banyak makanya Masyarakat lebih memilih memberikan lahan kepada orang yang punya uang atau dalam hal ini investor luar”(Hasil Wawancara, RD. 12 Mei 2025)

Dari hasil yang di peroleh bahwa memang peningkatan taraf hidup Masyarakat meningkat namun distribusi manfaat belum semua di rasakan oleh Masyarakat yang ada di Kecamatan Tinggimoncong secara menyeluruh karena Pembangunan pariwisata masih berfokus di ibu kota Kecamatan Tinggimoncong. Sealain dari itu kebanyakan pemanfaatan lahan itu di kelolah oleh orang luar atau investor yang datang. Sebagai Gambaran kualitas hidup Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong dapat di lihat dari Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan dan tempat peribadatannya sebagai bentuk perkebangan yang telah di rasakan dari peningakatan industri wisata yang ada. Berikut tabel Jumlah Pendidikan, Kesehatan dan tempat peribadatan di Kecamatan Tinggimoncong:

Tabel 4. 9 Data Penujang Kualitas Hidup Masyarakat Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2024

No	Nama	Jumlah
1.	Sekolah (Tk.SD,SMP,SMA)	54
2.	Penunjang Kesehatan	2
3.	Tempat Ibadah (Masjid, Musholah dan Gerja)	101

Sumber: Kecamatan Tinggimoncong Dalam Angka Tahun 2024

Tabel ini menunjukan bahwa penunjang kualitas Masyarakat secara Pendidikan sudah memadai untuk pengembangan sumber daya yang lebih baik. Namun, yang perlu tak kalah penting untuk di perhatikan adalah bagaimana penunjang dalam hal Kesehatan dapat memastikan Masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong mampu di tangani dalam hal kesehatanya secara menyeluruh. Selanjutnya penunjang yang lain adalah tempat ibadah sebagaimana mayoritas penduduk di Kecamatan Tinggimoncong ber agama Islam baik pengunjung wisata yang datang kebanyakan ber agama Islam maka penting kiranya Masid dan Musholah itu dapat terpenuhi begitupun tempat Ibadah yang sekiranya perlu.

Dalam rencana induk Pembangunan kepariwisataan daerah pasal 21 terkait a. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; b. program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional; c. program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; d. program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan e. program pembinaan sejarah; dan f. program peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata. Belum sepenuhnya tercapai.

4. Responsivitas Pemerintah Terkait Kebijakan Penggunaan Lahan

Responsivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam kebijakan penggunaan lahan. Evaluasi ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan tingkat konflik yang terjadi.

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan wawancara, partisipasi pada tingkat desa cukup tinggi, tetapi minim di level kabupaten. Adapun salah satu narasumber dari Masyarakat menyampaikan bahwa:

"...partisipasi masyarakat bisa mencapai 50%. Tapi saat pembahasan kebijakan di tingkat kabupaten, keterlibatan masyarakat sangat terbatas. Masyarakat hanya terlibat pada saat musyawarah Pembangunan di Tingkat kelurahan dan desa." (Hasil Wawancara, AR. 21 Maret 2025).

Meskipun partisipasi masyarakat di tingkat desa cukup aktif, keterlibatan dalam perencanaan kabupaten masih rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi peningkatan responsivitas kebijakan secara menyeluruh.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu Masyarakat terkait dengan bagaimana partisipasi Masyarakat dalam memenuhi arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah disampaikan dalam hasil wawancara berikut:

"Memang ada musrembang tapi biasanya yang ikut dalam musrembang adalah Sebagian saja dari Masyarakat". (Hasil Wawancara, RD. 12Mei 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa harus ada ruang yang disediakan untuk Masyarakat Kecamatan Tinggimoncong untuk ikut berpartisipasi sepenuhnya dalam menentukan kebijakan yang sesuai untuk di jalankan di Kecamatan Tinggimoncong seperti dialog Publik atau semacam FGD

(*Focus Group Discussion*) agar Pembangunan yang di lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat.

b. Konflik Penggunaan Lahan

Tingkat konflik lahan menjadi indikator seberapa baik respons pemerintah dalam menyelesaikan masalah. Selama lima tahun terakhir terdapat beberapa kasus, yang sebagian besar diselesaikan melalui mediasi adat. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong sebagai berikut:

"Memang tidak bisa di pungkiri konflik yang terjadi tapi kami berusaha untuk melakukan mediasi ketika terjadi sengketa lahan" (Hasil Wawancara, AR. 21 Maret 2025).

Tingkat konflik yang relatif rendah menunjukkan bahwa respons penyelesaian masalah oleh pemerintah cukup efektif. Namun, sistem penyelesaian konflik masih memerlukan penguatan kelembagaan. Akan tetapi Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong menunjukkan sikap responsif terhadap keluhan yang muncul terkait penggunaan lahan dan pembangunan tempat wisata sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara dibawah Kasi Pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong menegaskan:

"Kalau ada keluhan atau konflik soal penggunaan lahan, pihak kecamatan biasanya langsung melakukan mediasi." (Hasil Wawancara AR, 21 Maret 2025).

Namun, meskipun ada respons yang cepat terhadap masalah yang muncul, pendekatan ini masih terkesan reaktif dan belum diimbangi dengan mekanisme evaluasi berkala yang sistematis. Staff

Pengembangan destinasi wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa juga menyampaikan hal serupa terkait kurangnya sistem yang lebih terstruktur untuk menampung aspirasi Masyarakat. Staff Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Gowa menegaskan bahwa :

“Pemerintah sangat responsif terhadap masukan masyarakat... tapi belum ada mekanisme evaluasi berkala yang formal.” (Hasil Wawancara JT, 6 Februari 2025).

Berikut adalah data konflik penggunaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yang menunjukkan ada 5 sengketa lahan yang terjadi di Kecamatan Tinggimoncong.

Tabel 4. 10 Data Konflik penggunaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong Tahun 2021-2025

No	Lokasi	Jenis Konflik
1	Desa Batulapisi, Kel. Malino	Sengketa tanah antar warga dan kuasa hukum pemilik klaim
2	Lingk. Batulapisi Dalam, Malino	Alih fungsi hutan lindung menjadi kavling wisata
3	Buluballea, Desa Pattapang	Penggusuran lahan oleh perusahaan tanpa dasar hukum yang jelas
4	Desa Pattapang	Kriminalisasi petani oleh pihak kehutanan (BKSDA)
5	Kecamatan Tinggimoncong (umum)	Dugaan pungli dan jatah kavling dalam pengurusan surat tanah

Sumber: Humas Kabupaten Gowa (2021-2025)

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 5 kasus penggunaan lahan di Kecamatan Tinggimoncong dalam rentetan tahun 2021 samapi dengan 2025 dan salah satu konflik terdapat konflik terkait penggunaan lahan tempat wisata.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun ada respons cepat terhadap masalah yang ada, belum ada sistem yang memadai untuk menangani aspirasi dan keluhan masyarakat secara berkelanjutan juga di perlukan sosialisasi yang mendalam kepada Masyarakat tentang kebijakan yang di keluarkan oleh pihak pemerintah.

5. Ketepatan Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata

Ketepatan dianalisis melalui tiga aspek: dampak lingkungan, ketepatan sumber daya, dan metode yang digunakan dalam implementasi kebijakan.

a. Dampak Lingkungan

Perubahan fungsi lahan menjadi wisata memiliki konsekuensi ekologis. Staff Pengembangan destinasi wisata Dinas Pariwisata mengungkap adanya peningkatan sampah dan potensi erosi sebagaimana yang di sebutkan berikut :

"Ada peningkatan produksi sampah... namun dalam hal longsor tidak bisa di pungkiri karena tinggimoncong adalah daerah pegunungan jadi perlu kehati hatian dalam membuat tempat wisata" (Wawancara, JT. 6 Februari 2025)

Dampak lingkungan dari kegiatan wisata perlu menjadi perhatian serius. Ketepatan kebijakan dari sisi ekologis masih perlu di optimalkan, dan harus diimbangi dengan pendekatan pelestarian lingkungan.

Disampaikan juga hal yang sama oleh pihak pemerintah Kecamatan Tinggimoncong terkait dengan bagaimana dampak

lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas wisata yang mulai berkembang di wilayah Kecamatan Tinggimoncong berikut hasil wawancara dengan Kasi pemerintahan Kecamatan Tinggimoncong:

“Tapi dari sisi lingkungan, ada dampak negatif, terutama soal sampah yang makin banyak akibat aktivitas wisata yang terus berjalan setiap hari, namun pemrintah selalu berupaya dalam menangani hal tersebut”.(Hasil Wawancara, AR. 21 Maret 2025)

Ini menunjukan bahwa walaupun ada Upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas wisatawan namun dampak terkait sampah dapat mempengaruhi kenyamanan pengujung ketika tidak mampu kelolah dengan baik.

b. Ketepatan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya alam sudah cukup baik, namun pengembangan SDM masih menjadi hambatan utama dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat mengatakan::

"Dari sisi sumber daya manusia, masih banyak pelaku wisata yang belum punya keahlian khusus". (Hasil Wawancara, RD.12 Mei 2025)

Sumber daya alam telah dimanfaatkan secara tepat, tetapi kapasitas SDM masih rendah. Perlu pelatihan dan pendampingan bagi pelaku wisata lokal agar lebih profesional. Namun secara ketepatan sumber daya selain dari pada sumber daya manusia itu cukup sesuai apa yang disampaikan oleh Kabid pengembangan destinasi dinas pariwisata sebagai berikut:

“Sumber daya alam seperti hutan pinus, air terjun, dan perkebunan teh dimanfaatkan secara alami dan memang sesuai namun masih perlu pengembangan di kualitas manusianya”.(Hasil Wawancara, JT. 6 Februari 2025)

Maka penting kiranya pemerintah lebih memprioritaskan kualitas sumber daya manusia sebelum mengelolah sumber daya alam yang ada agar pengembangan wisata yang di lakukan lebih teratur dan memiliki potensi yang lebih Panjang dan berkelanjutan. Dari data Bada Pusat Statistik ada beberapa sumber daya yang ada di Kecamatan Tinggimoncong. Dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 11 Sumber Daya yang ada di Kecamatan Tinggimoncong

No.	Jenis Sumber Daya	Deskripsi
1	Pertanian dan Hortikultura	Lahan tegalan ± 12.896 ha, dengan sekitar 2.623 ha dimanfaatkan untuk budidaya hortikultura. Komoditas utama meliputi kentang, kol, sawi, dan bawang daun.
2	Buah Markisa	Desa Kanreapia dikenal sebagai sentra produksi buah markisa, yang menjadi salah satu ikon oleh-oleh khas Sulawesi Selatan.
3	Kehutanan dan Konservasi	Sekitar 10.273 ha merupakan hutan negara yang berfungsi sebagai kawasan konservasi dan tangkapan air untuk DAS Jeneberang. Hasil hutan meliputi kayu campuran, getah pinus, madu, dan rotan.
4	Pariwisata Alam dan Agrowisata	Kawasan wisata Malino menawarkan daya tarik seperti hutan pinus, air terjun Takapala, dan taman bunga. Potensi agrowisata juga tinggi.
5	Pertambangan dan Mineral	Terdapat potensi tambang batuan beku seperti andesit dan basalt, yang digunakan sebagai bahan bangunan dan konstruksi.

6	Sumber Daya Air	Wilayah ini merupakan bagian dari hulu DAS Jeneberang, penting untuk konservasi air dan mendukung pertanian serta kebutuhan air bersih di wilayah hilir.
7	Sumber Daya Manusia & Sosial	Sebagian besar masyarakat bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Pelatihan koperasi telah dilakukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Sumber: Badan Pusat Statistik-Kecamatan Tinggimoncong dalam angka Tahun 2024

Berdasarkan tabel data sumber daya yang ada di Kecamatan Tinggimoncong memang bagus untuk dikembangkan sebagai sasaran Pembangunan destansi wisata karena dengan potensi yang dimiliki seperti kekayaan alam dan wilayah yang subur dapat dikembangkan menjadi agroowisata dan sebagainya agar pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata meningkat tapi tetap menjaga ekosistem yang ada dan pemanfaatannya bisa berkelanjutan.

c. Ketepatan Metode

Berbicara kebijakan Metode top-down yang dominan membuat masyarakat merasa kurang dilibatkan. Masyarakat dan Dinas Pariwisata menyadari perlunya pendekatan partisipatif. Hal ini disampaikan pada sebagaimana yang di sebutkan berikut:

"Meskipun ada musyawarah pembangun setiap tahun namun hanya Sebagian saja yang mengikutiinya dan itupun biasanya kebijakan itupun hanya disampaikan saja..." (Hasil Wawancara, RD. 12 Mei 2025).

Dari sini, bisa dilihat bahwa perlu ruang yang lebih untuk Masyarakat agar kebijakan yang di hadirkan lebih tempat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat

Maka pihak dinas pariwisata memang sudah menegaskan bahwa perlu ada metode yang lain di gunakan dalam agar kebijakan lebih tepat sasaran dan optilam menegaskan bahwa:

"Perlu pendekatan partisipatif agar kebijakan lebih tepat sasaran." (Hasil Wawancara, JT. 6 Februari 2025).

Metode yang digunakan dalam perencanaan kebijakan masih kurang tepat karena minimnya pelibatan masyarakat sejak awal. Pendekatan partisipatif perlu diterapkan agar kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemerintah belum cukup tanggap terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul sebagai konsekuensi dari pembangunan pariwisata. Tidak adanya tempat pembuangan akhir (TPA) di Kecamatan Tinggimoncong menjadi permasalahan serius karena semua sampah harus diangkut ke TPA Cadika di daerah lain. Volume sampah meningkat seiring dengan pertambahan jumlah wisatawan, namun kebijakan pengelolaan sampah belum disesuaikan.

Selain itu kebijakan yang di hadirkan itu berasal dari pemerintah jadi partisipasi Masyarakat terbatas dalam mengajukan dan mengusulkan program program baik untuk di laksanakan dan juga kurang pemahaman terkait dengan bagaimana aturan atau kebijakan yang di hasilkan.

C. Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian berdasarkan lima indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, (2003) yaitu efektivitas, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kesesuaian. Pembahasan ini diperkuat dengan teori serta hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan.

1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara Pemerintah Kecamatan Tinggimoncong, disebutkan bahwa implementasi kebijakan sudah mengacu pada RTRW dan Rencana Induk Pariwisata. Namun, pencapaian tujuan masih parsial. Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya pendataan administratif yang lengkap terhadap seluruh lokasi wisata, serta keterbatasan pegawai dalam pengawasan.

Hal ini sejalan dengan temuan Alamsyah (2017) dalam penelitiannya tentang efektivitas kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Bandung, yang menyatakan bahwa meskipun kebijakan dirancang dengan baik, implementasinya masih lemah karena terbatasnya kapasitas birokrasi dan pengawasan.

Dari sudut pandang teori, William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa efektivitas hanya bisa dicapai jika sumber daya, struktur organisasi, dan prosedur pendukung tersedia secara memadai. Dalam konteks Tinggimoncong, belum optimalnya pengawasan dan pendataan

menunjukkan bahwa komponen pendukung kebijakan masih belum maksimal.

2. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan apakah kebijakan mampu mengatasi masalah yang ada. Dalam kasus ini, pembangunan pariwisata belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat lokal. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber dari masyarakat, “hasil yang didapatkan lebih banyak kembali ke pemilik modal, tidak seberapa yang kembali ke masyarakat.” Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Penelitian sebelumnya oleh Nurhidayati (2020) mengenai pembangunan wisata di Kabupaten Sleman menunjukkan hal serupa, yakni bahwa masyarakat lokal hanya menikmati sebagian kecil dari manfaat ekonomi wisata akibat dominasi investor dan lemahnya pengaturan distribusi keuntungan.

Teori Dunn (2003) juga menekankan bahwa kebijakan yang cukup adalah yang mampu mengurangi atau menyelesaikan masalah publik secara signifikan. Jika hanya sebagian masalah yang bisa di atasi—seperti terbukanya lapangan kerja tetapi distribusi ekonomi tidak merata—maka kebijakan dinilai belum cukup.

3. Kesetaraan

Kesetaraan menyangkut sejauh mana manfaat kebijakan dirasakan secara adil oleh semua pihak. Di Tinggimoncong, sebagian besar masyarakat belum merasakan manfaat kebijakan secara merata. Sebagian besar lahan dikuasai oleh investor, sementara masyarakat lokal tidak sepenuhnya paham soal legalitas lahan dan perizinan. Seorang warga menyampaikan, “masyarakat banyak yang menyerahkan lahannya ke investor karena kurang paham soal peruntukan lahannya.”

Fenomena ini juga dijelaskan dalam studi oleh Aditya (2016) mengenai ketimpangan dalam pemanfaatan lahan wisata di Lombok, di mana masyarakat lokal kerap terpinggirkan akibat minimnya literasi hukum dan lemahnya posisi tawar terhadap pemilik modal.

4. Responsivitas

Responsivitas menggambarkan sejauh mana pemerintah menanggapi kebutuhan, aspirasi, dan keluhan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa respons pemerintah bersifat reaktif dan belum sistematis. Seperti disebutkan oleh pemerintah Kecamatan Tinggimoncong , “kalau ada keluhan atau konflik, biasanya kami mediasi. Tapi belum ada evaluasi rutin.”

Hal ini diperkuat oleh pihak dari Dinas Pariwisata yang menyebut bahwa meski pemantauan dilakukan, evaluasi kebijakan secara berkala belum berjalan. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kebijakan yang responsif

harus mampu merespons secara adaptif terhadap perubahan sosial dan masukan dari masyarakat.

Dalam penelitian oleh Herlina (2019) di Bali, diketahui bahwa responsivitas pemerintah terhadap keluhan warga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wisata berbasis komunitas. Tanpa sistem umpan balik dan evaluasi yang kuat, kebijakan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika lokal

5. Ketepatan

Ketepatan dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan publik sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, serta seberapa relevan kebijakan tersebut dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan ekologis setempat.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Tinggimoncong, dapat diketahui bahwa sebagian kebijakan penggunaan lahan untuk pariwisata belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terlihat dari pernyataan narasumber: “Kalau dilihat secara kondisi masyarakat untuk membuka lahan wisata sebenarnya terbatas karena di ketahui Kecamatan Tinggimoncong masuk dalam kawasan hutan lindung jadi diperlukan izin-izin untuk pembukaan lahan.” Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum secara akurat mempertimbangkan keterbatasan status kawasan hutan lindung sebagai hambatan struktural dalam pengembangan lahan wisata. Di sisi lain, narasumber juga menyampaikan bahwa masyarakat banyak yang menyerahkan lahannya kepada investor karena kurang pemahaman terhadap

legalitas dan peruntukan lahan. Ini mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam mekanisme edukasi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Dari perspektif teoritis, Dunn (2003) menegaskan bahwa ketepatan kebijakan tercapai ketika instrumen yang digunakan sesuai dengan kondisi masalah dan mampu menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan penggunaan lahan untuk pariwisata di Kecamatan.

Belum ada sistem pendampingan dan edukasi kepada masyarakat lokal terkait peruntukan lahan, proses perizinan, dan kontrak kerja sama dengan investor.

Penelitian oleh Maulani (2021) tentang penggunaan lahan wisata di Kabupaten Lembang menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan tercapai ketika pemerintah menyediakan regulasi khusus untuk wilayah konservasi dan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada aspek hukum dan literasi lahan. Hal serupa seharusnya dapat diterapkan di Tinggimoncong mengingat karakteristik ekologis dan kondisi sosialnya yang serupa.

Lebih lanjut, aspek ketepatan juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur. Dalam wawancara disebutkan bahwa: "Infrastruktur perlu perbaikan karena dilihat pada saat hari tertentu terjadi kemacetan." Ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata belum dibarengi dengan kebijakan penunjang berupa pengembangan infrastruktur transportasi dan pengelolaan lalu lintas wisata, yang justru sangat dibutuhkan dalam konteks peningkatan pengujung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Kebijakan penggunaan lahan telah mendorong perkembangan sektor pariwisata secara signifikan, terlihat dari peningkatan jumlah destinasi dan aktivitas wisata. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena banyak lokasi wisata belum terdata resmi dan masih beroperasi tanpa izin. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat.

2. Kecukupan

Regulasi yang ada, seperti RTRW dan Rencana Induk Pariwisata, sudah tersedia namun belum cukup kuat secara implementatif. Ketiadaan evaluasi rutin, belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan tertentu, serta lemahnya sistem pengawasan menjadikan pelaksanaan kebijakan belum memadai.

3. Kesetaraan

Manfaat ekonomi dari pengembangan wisata belum dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal. Sebagian besar keuntungan masih dinikmati oleh pemilik modal atau investor, sementara keterlibatan masyarakat hanya sebatas sebagai tenaga kerja informal. Pemerintah belum optimal dalam mengarahkan kebijakan agar berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal.

4. Responsivitas

Pemerintah Kecamatan dan OPD terkait cenderung menangani permasalahan secara reaktif. Keluhan masyarakat sering diselesaikan melalui mediasi tanpa ada mekanisme evaluasi atau pelaporan yang sistematis. Respons kebijakan terhadap isu-isu lingkungan dan sosial juga belum terstruktur dengan baik.

5. Ketepatan

Kebijakan belum sepenuhnya tepat dalam hal sasaran dan implementasi. Banyak masyarakat yang tidak memahami batasan fungsi lahan, khususnya dalam kawasan hutan lindung. Kurangnya edukasi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya infrastruktur publik juga memperlihatkan bahwa kebijakan masih perlu perbaikan agar lebih tepat guna dan kontekstual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu penguatan kelembagaan dan pendataan

Pemerintah Kecamatan dan Dinas terkait perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan memperkuat pendataan administratif terhadap seluruh destinasi wisata, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berkembang.

2. Penyusunan dan penerapan RDTR

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas PUPR perlu segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan Tinggimoncong sebagai acuan pengendalian pembangunan wisata secara spesifik dan teknis.

3. Pemberdayaan masyarakat lokal

Kebijakan penggunaan lahan harus diarahkan agar membuka ruang lebih luas bagi masyarakat lokal untuk terlibat sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai tenaga kerja. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan dan akses permodalan yang adil.

4. Penguatan regulasi dan sistem pengawasan

Pemerintah perlu mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi terkait perizinan dan pengelolaan wisata, khususnya yang berkaitan dengan kawasan lindung. Mekanisme pengawasan juga harus diperkuat untuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak sesuai.

5. Pengelolaan dampak sosial dan lingkungan

Pemerintah harus menyusun strategi khusus dalam menangani dampak lingkungan, seperti pengelolaan sampah, kemacetan, dan polusi suara. Selain itu, perlu keterlibatan lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial) untuk mengantisipasi dampak sosial budaya akibat peningkatan aktivitas wisata.

DAFTAR PUSTAKA

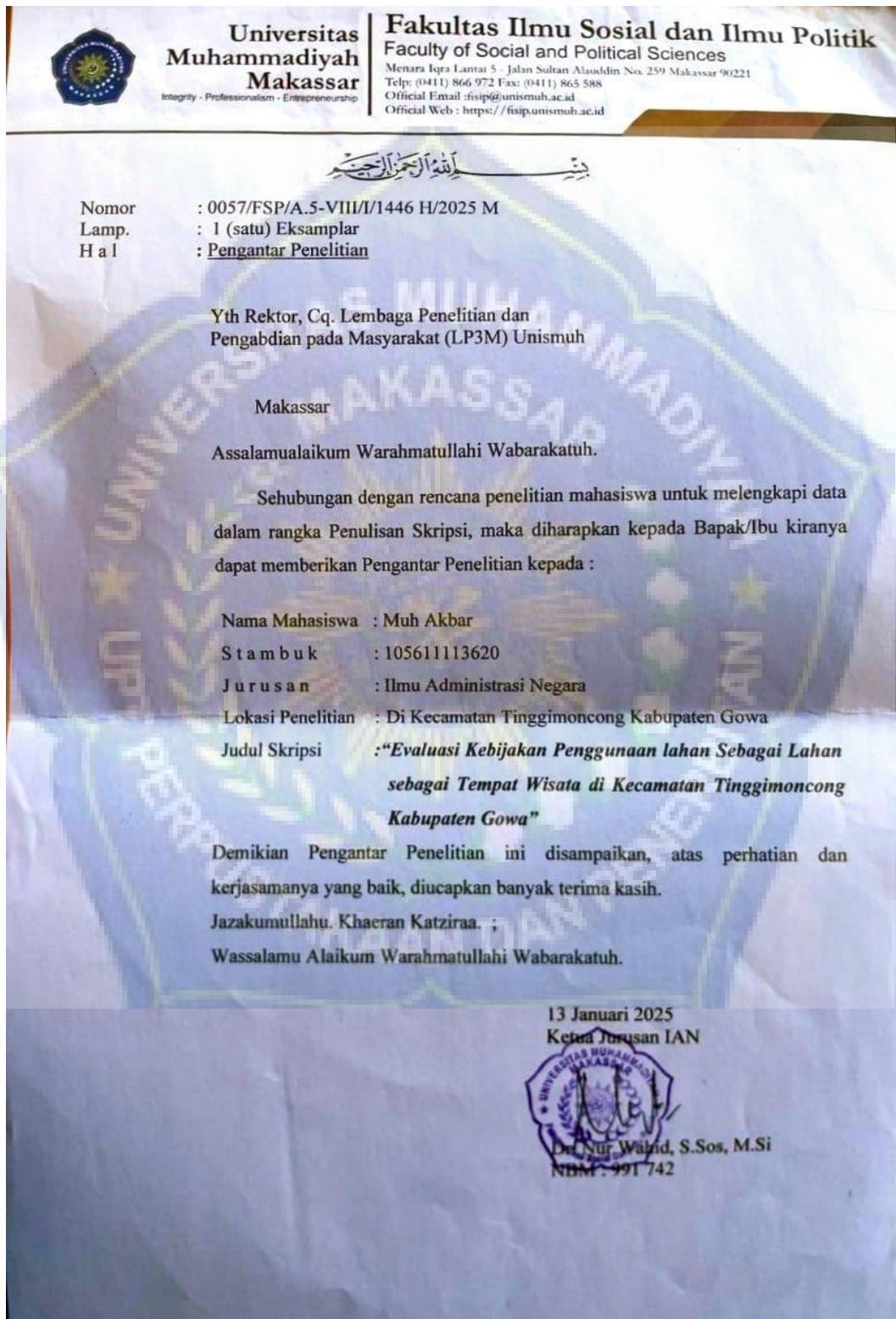
- Aditya, R. (2016). "Ketimpangan Manfaat Wisata di Lombok." *Jurnal Kajian Sosial*, 9(1).
- Alamsyah, H. (2017). "Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2).
- Annas, A., & Rusnaedy, Z. (2019). Evaluasi kebijakan tata ruang dan bangunan reklamasi Pantai Metro Tanjung Bunga Kota Makassar. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 117.
- Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.
- Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik* (Samodra Wibawa, Penerj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th Edition). Boston: Pearson Education.
- Eka, A. (2020). Kebijakan konversi lahan pertanian menjadi objek wisata di Kecamatan Baturraden perspektif Maqaṣid Syari’ah. IAIN Purwokerto.
- Fauziah, L. M., Kurniati, N., & I., I. (2018). Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif penerapan asas tata guna tanah. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an*, 2(1), 102.
- FAO. (1995). Planning for Sustainable Use of Land Resources: Towards a New Approach. FAO Land and Water Bulletin No. 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Herlina, D. (2019). "Responsivitas Pemerintah dalam Pengelolaan Wisata Berbasis Komunitas di Bali." *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3).
- Lasswell, Harold D. (1951). The Policy Orientation. In D. Lerner & H. Lasswell (Eds.), *The Policy Sciences: Recent Developments in Scope and Method*. Stanford University Press.
- Mais, R., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Evaluasi kebijakan pelaksanaan reward dan punishment aparatur sipil negara di Kota Bitung. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Maulani, D. (2021). "Evaluasi Ketepatan Kebijakan Pemanfaatan Lahan Wisata di Kawasan Konservasi Kabupaten Lembang." *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 13(

- Munawir, M., Barus, B., & Sudadi, U. (2019). Analisis spasial dinamika konversi lahan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. *TATALOKA*, 21(2), 237.
- Nafiah, M., Ati, N. U., & Suyeno, S. (2022). Evaluasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2010-2030. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 19–27.
- Nurhidayati, A. (2020). “Distribusi Ekonomi Pariwisata di Sleman.” *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(1).
- Pemerintah Kabupaten Gowa. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032*.
- Pemerintah Yogyakarta. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.
- Pemerintah Yogyakarta. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*.
- Pemerintah Yogyakarta. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2035
- Permatasari, I. A. (2020). Kebijakan publik (teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37.
- Purwanto, A. (2013). Evaluasi kesesuaian lahan untuk pariwisata Pantai Kura-Kura di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang Provinsi Yogyakarta Barat. *Jurnal Edukasi*, 11(2), 141–151.
- Rahman, A., Iskandar, H., & Utami, R. (2021). Tantangan implementasi kebijakan tata ruang di daerah wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 53–69.
- Rahmawati, S., & Kurniawan, R. (2019). Analisis dampak lingkungan pada pengembangan pariwisata Gunung Bromo. *Jurnal Ekologi dan Lingkungan*, 6(4), 313–329.
- Sihombing, N., & Sihombing, T. (2023). Evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Lintong Nihuta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 10(1), 7–14.
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan publik: Teori analisis, implementasi, dan evaluasi kerja*. Yogyakarta: Social Security Development Institute (SSDI).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Taufik, R., & Nurhadi, S. (2018). Dampak penggunaan lahan untuk pariwisata di Bali: Studi kasus di Canggu. *Jurnal Pariwisata dan Kebijakan Publik*, 5(2), 102–115.
- Wirandi, W. W., & Sahar, S. (2020). Evaluasi kebijakan peraturan desa tentang kawasan bebas merokok (studi kasus kawasan tempat umum Desa Carawali). *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(3), 20–29.
- Yanuari, A., & Lestari, P. (2020). Evaluasi dampak perubahan penggunaan lahan di kawasan wisata Yogyakarta. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 15(3), 211–225.
- Yenti, N. S., Yusran, R., Alhadi, Z., & Fajri, H. (2023). Evaluasi pengelolaan kebijakan kepariwisataan, objek wisata Danau Di atas, Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 1–8.
- Yoga, F. D., & Khomsin, K. (2013). Evaluasi kemampuan lahan untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan menggunakan data citra satelit. *Geoid*, 8(2), 151.

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian Dari Fakultas



Surat Permohonan Izin Penelitian Dari UNISMUH



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5758/05/C.4-VIII/I/1446/2025

13 January 2025 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

13 Rajab 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –

Makassar

السـلام عـلـيـك و رحـمة الله و بـرـهـانـهـ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0057/FSP/A.5-VIII/I/1446 H/2025 M tanggal 13 Januari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH AKBAR

No. Stambuk : 10561 1113620

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT WISATA DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Januari 2025 s/d 15 Maret 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

السـلام عـلـيـك و رحـمة الله و بـرـهـانـهـ

Ketua LP3M,
Arief Muhsin, M.Pd.
 NBM 1127761

Surat Izin Penelitian Dari Kantor PTSP



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://slmp-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	:	1015/S.01/PTSP/2025	Kepada Yth.
Lampiran	:	-	Bupati Gowa
Perihal	:	<u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5758/05/C.4-VIII/I/1446/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	:	MUH AKBAR
Nomor Pokok	:	105611113620
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT WISATA DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 13 Januari s/d 13 Maret 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Portinggal.

Surat Izin Penelitian dari PTSP Kab.Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Hos Cokrominoto No 1 Gedung Mal Pelayanan Publik Lt. 3 Sungguminasa Kab Gowa 92111,
Website dpmpptsp.gowakab.go.id

Nomor : 503/119/DPM-PTSP/PENELITIAN/I/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada Yth,
1.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
2.Kepala Dinas Pariwisata
di –
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 1015/S.01/PTSP/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara/l dia yang tersebut dibawah ini:

Nama : MUH AKBAR
Tempat/ Tanggal Lahir : Jaleko / 7 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Pokok : 105611113620
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Garassi

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi / Tesis / Disertasi / Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT WISATA DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KAB. GOWA"

Selama : 13 Januari 2025 s/d 13 Maret 2025

Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Surat Keterangan akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan disungguminasa, pada tanggal : 30 Januari 2025

a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA



TT ELEKTRONIK

HINDRA SETIAWAN ABbas, S.Sos, M.Si
Nip. 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Camat Tinggimoncong

Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Jalan Masjid Raya Nomor 30, Kantor Bupati Gedung C Lantai 2, Sungguminasa, Gowa
 Laman pariwisata.gowakab.go.id, Pos-el disparbudgowa@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 500.13/31/Disparbud

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/068/DPM-PTSP/PENELITIAN/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Surat Keterangan Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama	:	MUH AKBAR
Tempat / Tgl Lahir	:	Jaleko / 7 Maret 2002
Nomor Pokok	:	105611113620
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Garassi

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi yang berjudul "EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN LAHAN SEBAGAI TEMPAT WISATA DI KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN GOWA" dilaksanakan dari tanggal 13 Januari s/d 13 Maret 2025

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanaan kegiatan yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa.

Demikian rekomendasi dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 31 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
KEPALA DINAS

RATNAWATI, SS, M.Ed
Pangkat : Pembina Tk.I / IV.b
NIP : 197401212005022002

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Yang Bersangkutan;
3. Pertinggal

Catatan :
 • UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 *Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR.
 • Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



DOKUMENTASI PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



DINAS PERUMAHAN,KAWASAN,PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

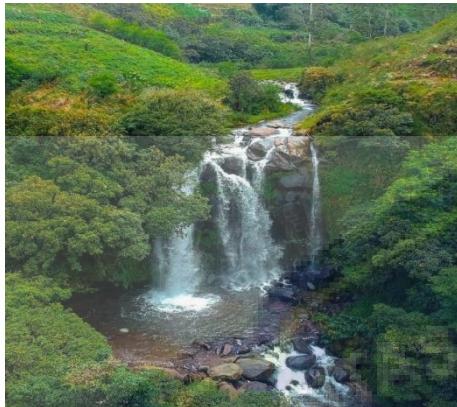
PEMERINTAH KECAMATAN



MASYARAKAT

DOKOMENTASI LOKASI WISATA BERDASARKAN RIPPDA

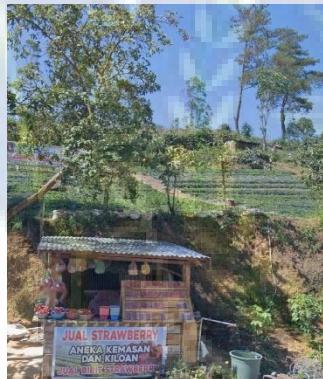
1. Air Terjun Lembanna



2. Hutan Pinus Lembanna



3. Kebun Stroberi



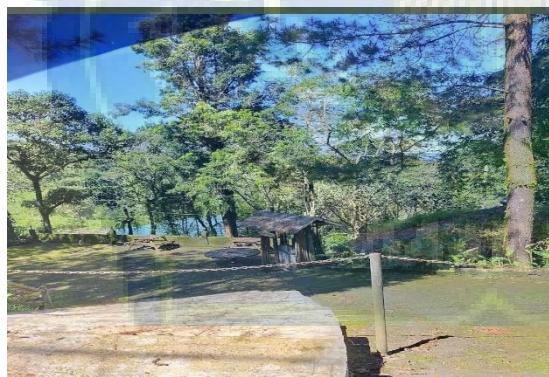
4. Hutan Pinus Malino



5. Malino Highland



6. Lembah Hijau



7. Air Terjun Parangbugisi



8. Air Terjun Ketemu Jodoh



9. Lembah Biru



10. Air Terjun Takapala



**DOKUMENTASI LOKASI REKOMENDASI YANG DI KELUARKAN
DINAS PARIWISATA TAHUN 2022-2024**

1. Malino Wonderland



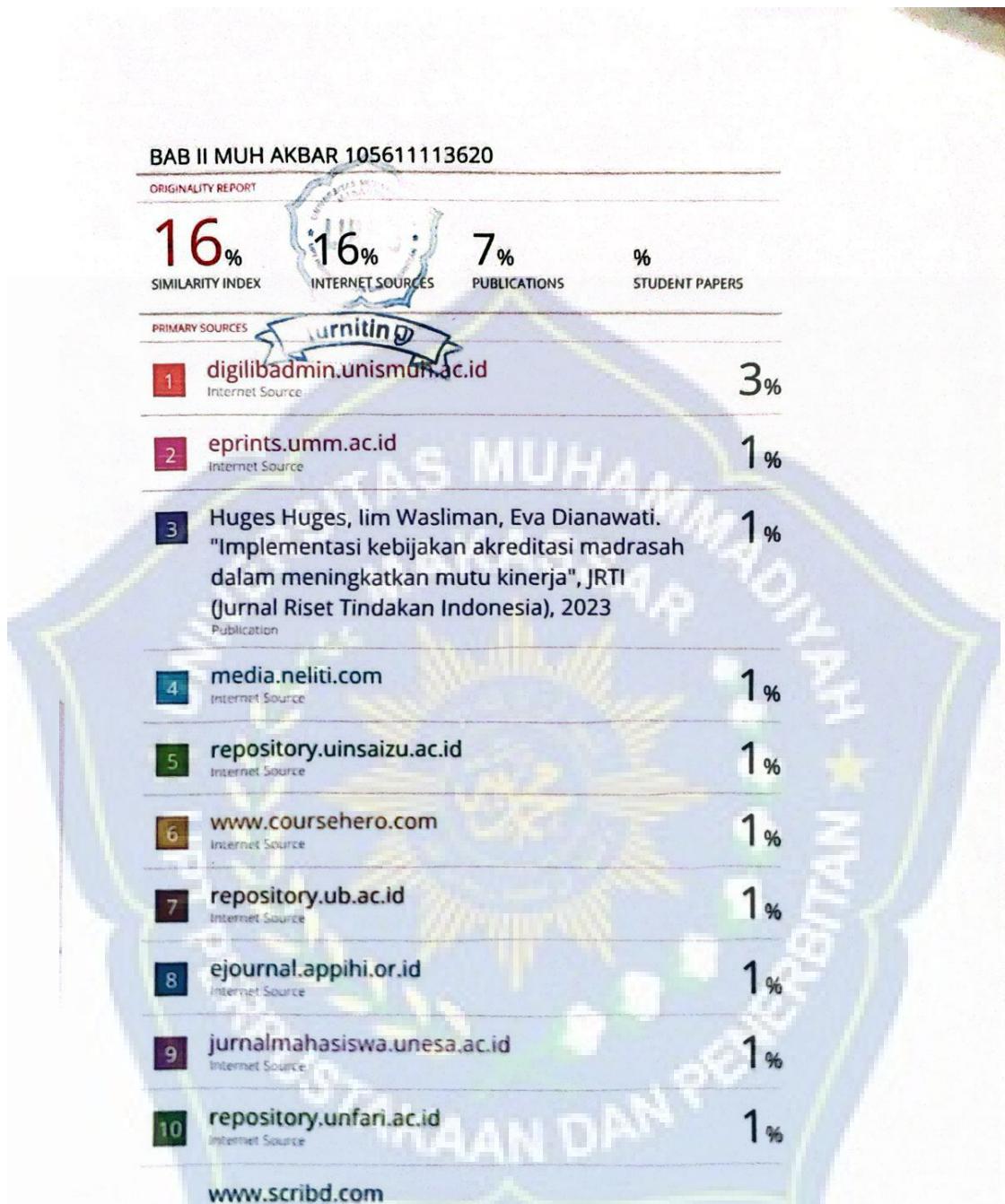
HASIL PLAGIASI

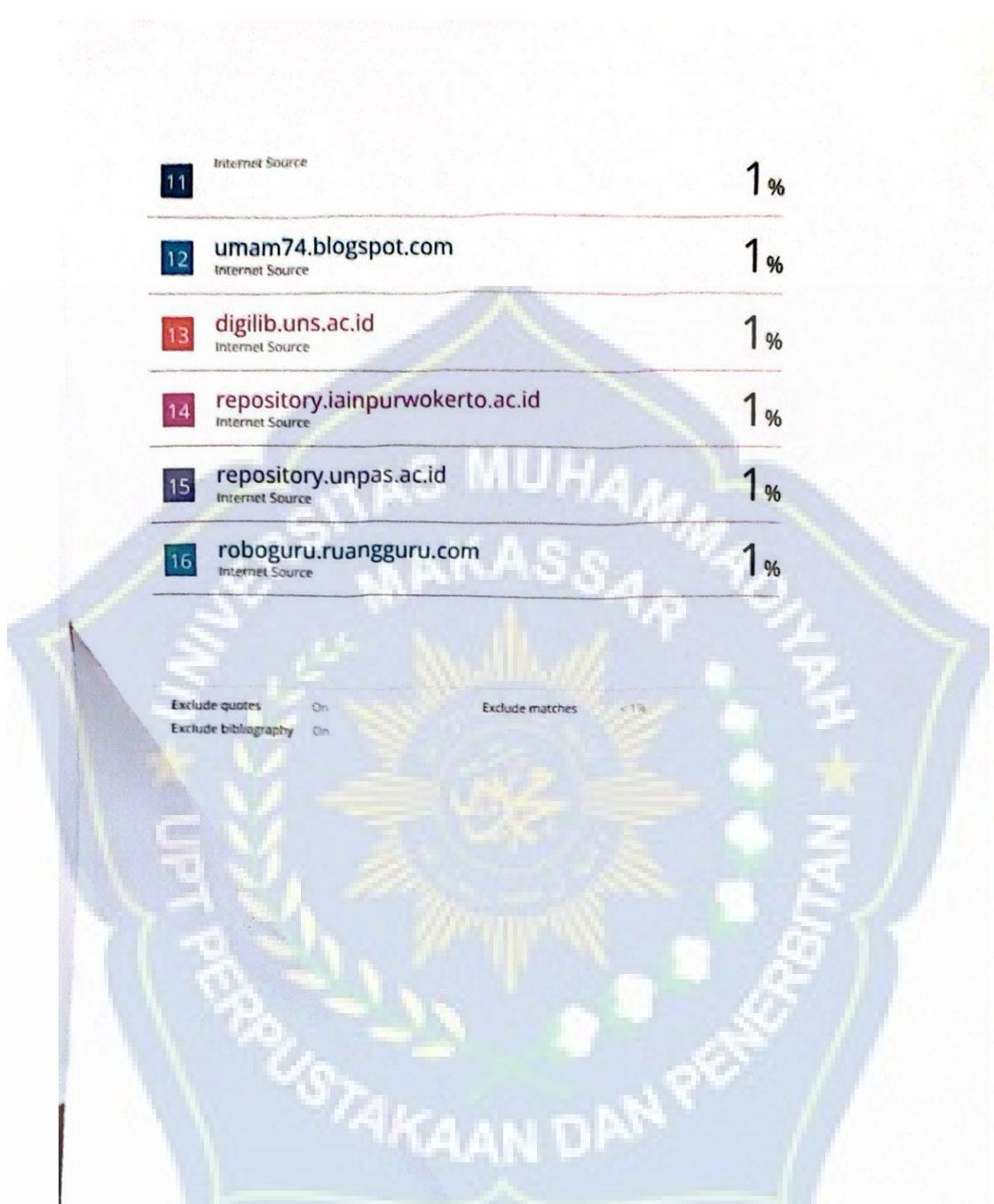






Dipindai dengan CamScanner





Dipindai dengan CamScanner







Dipindai dengan CamScanner



12	Reny Rianti, Pramushinta Arum Pynanjung. "VALUATION OF POTENCY RIAM PANGAR'S ECOTOURISM IN BENGKAYANG DISTRICT", JURNAL BORNEO AKCAYA, 2017 Publication	<1 %
13	ppidutama.kalselprov.go.id Internet Source	<1 %
14	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
15	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
16	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	eng.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
20	media.neliti.com Internet Source	<1 %
21	www.bolnica-gracanica.com Internet Source	<1 %
22	Dhani Akbar, Teguh Setiandika Igiasi. "Peran Pemuda dalam Pengembangan Wisata di Desa Pongkar Kabupaten Karimun", KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2019 Publication	<1 %

23	bappeda.bengkaliskab.go.id Internet Source	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	docplayer.info Internet Source	<1 %
26	dpr.go.id Internet Source	<1 %
27	insistpress.com Internet Source	<1 %
28	issuu.com Internet Source	<1 %
29	jurmafis.untan.ac.id Internet Source	<1 %
30	penulis-elex.blogspot.com Internet Source	<1 %
31	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
32	Nurul Fatiha Renuat, Julista Mustamu, Merlien Irene Matitaputty. "Keabsahan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Tual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2023 Publication	<1 %
33	danisuluhppermadi.web.id Internet Source	<1 %



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



 Dipindai dengan CamScanner

'DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Muh Akbar lahir di Jaleko Kelurahan Garassi pada tanggal 07 Maret 2002. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Yunus Dg Kalling dan Ibu Dg. Ngintang . Penulis memeluk agama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Inpres Jaleko dari tahun 2008 hingga 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 3 Tinggimoncong pada tahun 2014 hingga 2017.

Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Gowa dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan, di antaranya sebagai Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Gowa Koordinatorat Tinggimoncong pada tahun 2022-2023, Sebagai Anggota Bidang Kajian dan Penalaran Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Admininstrasi Negara pada tahun 2022–2023, dan juga ikut terlibat menjadi kader Barisan Pemuda Adat Nusantara pada tahun 2022 dan Aliansi Masayarakat Adat Nusantara Pada Tahun 2023

Pengalaman akademik dan non-akademik tersebut menjadi bekal berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa*".